



LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN I | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau
Tahun 2025

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	a. Fiky Rahman, ST	Penyusun Rencana & Pelaporan		
		b. Aulia Devi Kirana, S.Pd	Penyusun Rencana & Pelaporan		
2.	Diperiksa	Taufiq Hidayat, SE., M.MTr	Kepala Subbagian Tata Usaha	Apr 19, 2025	
3.	Disetujui	Taufiq Hidayat, SE., M.MTr	Kepala Subbagian Tata Usaha	Apr 19, 2025	
4.	Disetujui	Wisnu Herlambang, A.Md. LLAJ., S.A.P., M.M	Kepala Seksi Sarana & Angkutan Jalan, Sungai, dan Penyeberangan		
5.	Disetujui	Yuliansyah, S.SiT., M.M	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan		
6.	Disetujui	Allumni Mulki, S.SiT., M.Sc	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan		

Daftar Isi



Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	v
Kata Sambutan	viii
Ringkasan Eksekutif	xi

Bab I Pendahuluan

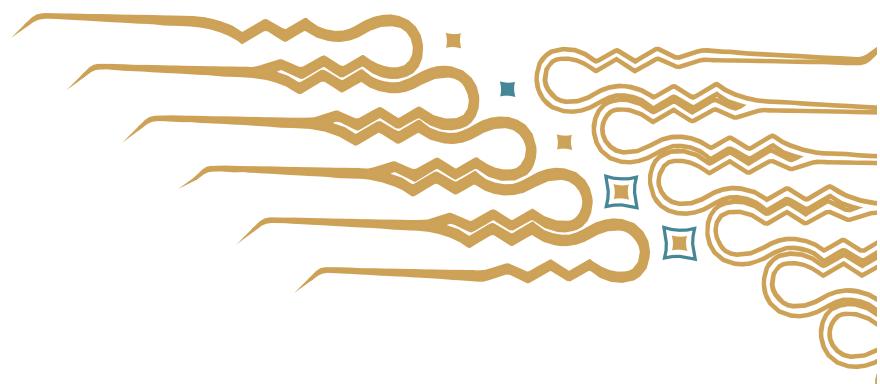
I.1 Latar Belakang	I-3
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	I-4
I.3 Sumber Daya Manusia	I-8
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	I-8
I.5 Sistematika Laporan	I-10
I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	I-11
I.7 Uraian Singkat Perjanjian Kinerja Tahun 2025	I-14

Bab II Capaian Kinerja Triwulanan

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	II-3
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	II-4
II.3 Realisasi Anggaran	II-87

Bab III Penutup

III. Penutup	III-3
--------------	-------



Daftar

Tabel



Table I.1 Data Jumlah Pegawai di Kelas II Riau	I-7
Tabel I.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan BPTD Kelas II Riau 2025-2029 Sesuai rencana strategis DITJEN HUBDAT Tahun 2025-2029	I-11
Tabel I.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	I-14
Tabel I.4 Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2025	I-15
Tabel II.1 Capaian IKK dan SK Triwulan I Tahun 2025	II-6
Tabel II.2 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	II-8
Tabel II.3 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Prov. Riau TA. 2025	II-9
Tabel II.4 Target Pelabuhan SDP yang Beroperasi di Prov. Riau & Prov. Kepulauan Riau	II-18
Tabel II.5 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	II-21
Tabel II.6 Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Tipe-A BRPS	II-24
Tabel II.7 Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Tipe-A Bangkinang	II-31
Tabel II.8 Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Tipe-A Dumai	II-38
Tabel II.9 Data UPUBKB Dinas Perhubungan di Provinsi Riau dan dalam pemenuhan Standarisasi berupa Akreditasi UPUBKB	II.61
Tabel II.10 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	II-67
Tabel II.11 Perhitungan IKK Tingkat Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	II.69
Tabel II.12 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	II.71
Tabel II.13 Perhitungan IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat	II.73

Tabel II.14 Perbandingan Pagu & realisasi	II.76
Tabel II.15 Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Pada Periode Triwulan I TA. 2025	II.77
Tabel II.16 Efisiensi Anggaran	II.78

Daftar Gambar



Gambar II.1 Realisasi IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan	II-9
Gambar II.2 Realisasi IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	II-14
Gambar II.3 Realisasi IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	II-16
Gambar II.4 Realisasi IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	II-19
Gambar II.5 Grafik Realisasi IKK Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	II-22
Gambar II.6 Realisasi IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	II-48
Gambar II.7 Grafik Realisasi IKK Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	II-51
Gambar II.8 Realisasi IKK Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	II-57
Gambar II.9 Realisasi IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	II-56
Gambar II.10 Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	II-58
Gambar II.11 Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan bermotor	II-62
Gambar II.12 Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Alur Pelayaran SDP	II-65
Gambar II.13 Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi	II-68
Gambar II.14 Realisasi IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	II-72



• KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau mengembangkan amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2025.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Pekanbaru, 17 April 2025





• RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming memulai kepemimpinannya melalui Kabinet Merah Putih periode Tahun 2025-2029 mengusung Visi "Asta Cita". Asta Cita yang dimaksud dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau sudah cukup baik. Dari 5 (Lima) Sasaran Kegiatan (SK), Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Triwulan I tahun 2025, terdapat 5 (Lima) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$).

Dari 14 (Empat Belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Triwulan I Tahun 2025, terdapat 3 (Tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan terealisasi sebesar 10% (target 100%) tercapai 10%;
2. Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi terealisasi sebesar 3 (target 3) tercapai 100%;
3. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terealisasi sebesar 50% (target 100%) tercapai 50%;
4. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 4 (target 37) tercapai 10,81%;
5. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A terealisasi sebesar 62,6% (target 100%) tercapai 62,6%;
6. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A terealisasi sebesar 50% (target 50%) tercapai 100%;

7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 62,5% (target 100%) tercapai 62,5%;
8. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 99% (target 90%) tercapai 110,89%;
9. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 72,06% (target 35%) tercapai 37,06%;
10. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0 Orang (target 200 Orang) tercapai 0%;
11. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 0% (target 68%) tercapai 0%;
12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terealisasi sebesar 0 (target 1) tercapai 0%;
13. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi senilai 81 (target 90) tercapai 16,5%;
14. Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 74,75 (target 100) tercapai 74,75%.

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kegiatan adalah sebesar 43,98%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, kegiatan, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan belum terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029. Hal ini dikarenakan adanya arahan untuk efisiensi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang masih belum mulai dilaksanakan, seluruh instansi yang ada masih menunggu arahan lanjutan terkait penggunaan anggaran yang sementara ini masih di *hold* pada sistem di Kementerian Keuangan.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.



BAB I

PENDAHULUAN

Bab I

Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaranya.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 1 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbang kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danai, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau menyelenggarakan fungsi:

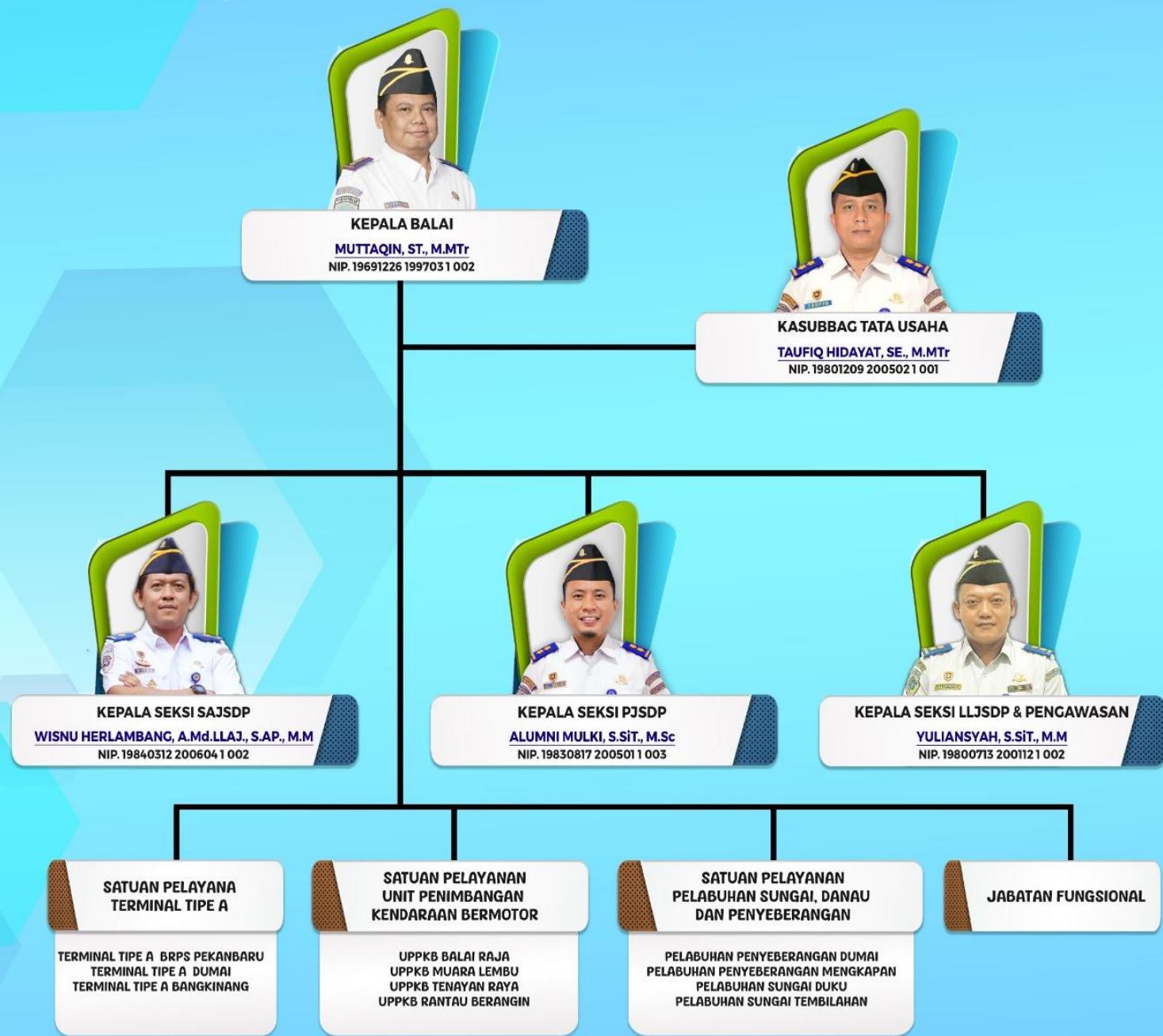
- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbang kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
- c. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Susunan Organisasi BPTD Tipe-A terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Prasarana jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II RIAU



a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan memiliki tugas melaksanakan pembangunan, pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraaan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta beantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyedia, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai, danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karosari, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, Pelabuhan dan penyelenggara Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal, sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, menegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta patrol dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau menaungi sebanyak 409 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Pegawai Balai Transportasi Darat Kelas II Riau

NO	UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPPK	PPNPN	SUB TOTAL
1	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau	1				1
2	Sub Bagian Tata Usaha	9	3		35	47
3	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan Sungai Danau Penyeberangan	10	1		14	25
4	Seksi Prasarana Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan	7	1		8	16
5	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	10	0		20	30
6	Terminal Tipe-A Bandar Raya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru	11	2		56	69
7	Terminal Tipe-A Dumai, Kota Dumai	3	0	1	29	33
8	Terminal Tipe-A Bangkinang, Kab. Kampar	5	1		23	29
9	UPPKB Balai Raja, Kab. Bengkalis	3	1		16	20
10	UPPKB Muara Lembu, Kab. Kuantan Singingi	5	1	0	23	29
11	UPPKB Rantau Berangin, Kab. Kampar	0	0		2	2
12	UPPKB Tenayan Raya, Kota Pekanbaru	10	2	1	12	25
13	PP Bandar Sri Junjungan, Kota Dumai	4	1		9	14
14	PP Rupat, Kab. Bengkalis	5	0		5	10
15	PP Sei Selari, Kab. Bengkalis	1	1		10	12
16	PP Air Putih, Kab. Bengkalis	2	0		10	12
17	PP Tj. Buton Mengkapan, Kab. Siak	2	0		3	5
18	PP Alai Insit - Pecah Buyung - Kampung Balak, Kab. Kepulauan Meranti	1	1		5	7
19	PS Sungai Duku, Kota Pekanbaru	4	0		7	11

NO	UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPPK	PPNPN	SUB TOTAL
20	PS Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir	2	1		9	12
	TOTAL	95	16	2	296	409

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- b. Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- c. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- b. Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

3) PM No. 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- a. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- b. Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim;
- c. Penyesuaian nomenklatur dan wewenang organisasi di beberapa matra perhubungan.

2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (BPTD dan Satuan Pelayanan). Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 1 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan masih terdapat Satuan Pelayanan yang belum memenuhi standar jumlah pegawai dalam menjalankan tupoksi.

3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. IM 9 Tahun 2024 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi di Bidang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
3. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
4. Pengoperasian Terminal Penumpang;
5. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
6. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
7. Perubahan *Mindset* dan *Culture* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
8. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
9. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
10. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta;
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN;
12. Peralihan SDM PPNPN yang akan menjadi ASN PPPK paling lambat pada Oktober 2025.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2025 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja
- I.3 Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- I.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
- II.3 Realisasi Anggaran

BAB III PENUTUP

- III.1 Kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Indeks Kinerja Utama Tahun 2025
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Kabalai 2025
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Kasubbag TU 2025
- Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Kasi SPTJ 2025
- Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Kasi LLAJ 2025
- Lampiran 7. Perjanjian Kinerja TSDKP 2025
- Lampiran 8. Rencana Aksi 2025
- Lampiran 9. Monitoring Renaksi 2025
- Lampiran 10. SK Dirjen Hubdat tentang Penetapan Lintas Penyeberangan 2025
- Lampiran 11. SK Dirjen Hubdat tentang Trayek Angkutan Jalan Perintis 2025
- Lampiran 12. Dokumen Lainnya

I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

I.6.1. Uraian Singkat Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 – 2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	37
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	50
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Lokasi	90
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	68

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1 Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

I.7. Uraian Singkat Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 130.466.736.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	37
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	50
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Lokasi	90
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	68
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SATUAN	TARGET 2025
5	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Perhubungan Darat	Ditjen	Nilai	100

Tabel 1.4 Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA 2025	TARGET PK 2025
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%		100
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi		3
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%		100
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi		37
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%		100
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%		50
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%		100
3	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Lokasi		90

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA 2025	TARGET PK 2025
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%		1
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang		200
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%		68
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi		1
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai		90
5	SK 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1 Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai		100



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab II

Akuntabilitas Kinerja

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.



II.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun Triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2025

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja.

Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja dengan capaian Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau maka rata-rata capaian dari seluruh Sasaran Kegiatan sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 1 Capaian IKK dan SK Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			Tw I	Tw I	Tw I
				T	R	C			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						42.70%		
IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	10	10%	Rp 1,773,330,250	Rp 809,182,758	11.41%
IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3	3	3	100%	Rp 1,786,774,750	Rp 3,396,491,417	47.52%
IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	50	50%	Rp 3,143,627,000	Rp -	0.00%
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	37	37	4	10.81%	Rp 1,001,672,500	Rp 406,485,115	10.15%
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						76.70%		
IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	100	100	62.6	62.60%	Rp 1,786,774,750	Rp 3,396,491,417	47.52%
IKK2.2	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	50	50	50	100%	Rp 1,786,774,750	Rp 3,396,491,417	47.52%
IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	67.5	67.5%	Rp 1,001,672,500	Rp 406,485,115	10.15%
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						7.41%		
IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	90	0	0%	Rp 2,778,250,000	Rp -	0.00%

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			Tw I TARGET PROGNOSA KEUANGAN	Tw I REALISASI KEUANGAN	Tw I CAPAIAN KEUANGAN
				T	R	C			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35	35	72.06	37.06%	Rp 871,644,500	Rp 619,134,602	17.76%
IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	100	0	0%	Rp -	Rp -	0.00%
IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	68	68	0	0%	Rp 103,100,000	Rp -	0.00%
IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	0	0%	Rp 250,000,000	Rp -	0%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					18.33%			2.36%
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	16.5	18.33%	Rp 1,018,085,000	Rp 96,087,419	2.36%
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					74.75%			23.68%
IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	74.75	74.75%	Rp 7,229,946,500	Rp 6,847,868,928	23.68%

Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan	43.98%
--	---------------

Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	37.93%
--	---------------

Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)	2
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)	12

Jika dilihat lebih detail, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, berdasarkan perjanjian kinerja dari 14 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau, terdapat 2 (dua) IKK berstatus hijau dan 12 (dua belas) IKK berstatus merah.

Penjelasan capaian IKK untuk setiap sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

II.2.1. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terdapat 4 (empat) IKK, yaitu:

1. IKK 1.1 : Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan,
2. IKK 1.3 : Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi,
3. IKK 1.5 : Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan,
4. IKK 1.6 : Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.2 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					42,70%
IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	10	10%
IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3	3	3	100%
IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	59	50%
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	37	37	4	10,81%

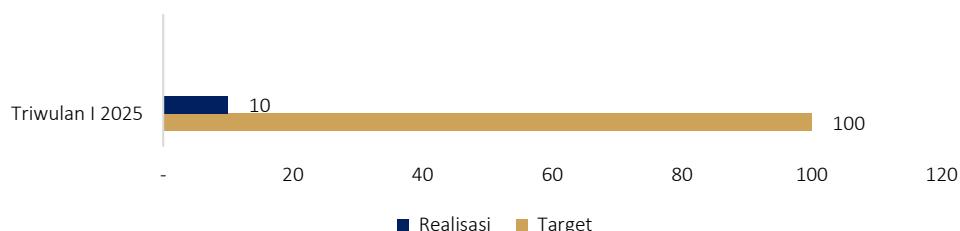
II.2.1.1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan I Tahun 2025 senilai 10% jika dibandingkan dengan target PK Triwulan I Tahun 2025 senilai 100% maka capaian kinerja mencapai 10%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan.



Gambar II. 1 Realisasi IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM Perhubungan No. 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
 - Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 5958 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 630 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Berupa Bantuan Biaya Operasional Angkutan Jalan Perintis.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Hubdat dengan nomor KP-DJPD Tahun 2024 tertuang jaringan trayek angkutan jalan perintis sebagai berikut :

Tabel II. 3 Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Prov. Riau TA. 2025

NO	RUTE TRAYEK	JARAK (Km)
1	Sungai Pagar – Gema (Kab. Kampar)	140
2	Minas – Tualang – Gasib - Siak Sri Indrapura – Bunga Raya – Sungai Apit – Mengkapan (Kab. Siak)	336
3	Bagan Siapiapi – Sinaboi	74
4	Siak – Sungai Mandau – Perawang	186
5	Bagan Batu – Tanjung Medan – Mahato	136

NO	RUTE TRAYEK	JARAK (Km)
6	Siak – Koto Gasib – Lubuk Dalam – Kerinci Kanan	116
7	Bagan Siapiapi – Pujud – Tanjung Medan	296
8	Bagan Batu – Simpang Kanan	66
9	Siak – Mengkapan – Tanjung Pal	230

- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebesar 100% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan I tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

- Faktor Keberhasilan

- Tersedianya anggaran;
- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas.

- Faktor Kegagalan

- Tidak Tersedianya anggaran;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berintegritas dan berkualitas.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$IKK\ 1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada periode tw atau tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{242}{2.420} \times 100\% = 10\%$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{10\%}{100\%} \times 100\% = 10\%$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan I Tahun 2025 yaitu Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan memiliki target keuangan Triwulan I senilai Rp. 1.773.330.250,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2024 Rp. 809.182.758,- atau mencapai 11,41%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan koordinasi bersama pihak penyedia angkutan perintis untuk selalu berupaya meningkatkan pelayanan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang belum memadai; dan
3. Melakukan monitoring secara berkala untuk dapat segera mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang kiranya dapat menghambat keberhasilan pekerjaan.

II.2.1.2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Terminal Tipe-A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Sedangkan, Terminal Barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun telah melayani Angkutan Barang di jalan. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau memiliki 3 (tiga) Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A sebagai berikut :

1. Terminal Tipe-A BRPS Kota Pekanbaru

Merupakan Terminal Induk dimana merupakan terminal asal-tujuan yang terletak di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan Luas lahan 37.470 ha dan Luas Bangunan Terminal sebesar 6.700 ha. Melayani trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Terminal Tipe-A BRPS Kota Pekanbaru memiliki fasilitas utama dan fasilitas pendukung sebagai berikut:

- **Fasilitas Utama :**

- 1) Jalur Keberangkatan
- 2) Jalur Kedatangan
- 3) Ruang Tunggu

- **Fasilitas Pendukung :**

- 1) Klinik
- 2) Fasilitas Keamanan
- 3) Ruang Istirahat Pengemudi

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 4) Area Parkir | 4) Endapan Bus |
| 5) Perlengkapan Jalan / Rambu | 5) Kios/ Kantin |
| 6) Loket Penjualan Tiket | 6) Masjid |
| 7) Pusat Informasi | 7) Toilet |
| 8) Gedung Utama/ Kantor | |
| 9) Peron | |

Indikator kerja pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A BRPS terhadap calon penumpang, penumpang yang singgah/turun, pengunjung dan masyarakat di sekitar lingkungan terminal yaitu:

a. Aspek pelayanan publik

Petugas memberikan informasi arah, lokasi terkait situasi di terminal. Mengarahkan bus sebagai petugas pengatur lalu lintas, memberikan pelayanan kepada sopir dan penumpang.

b. Aspek keamanan

Petugas ditempatkan di beberapa pos pemantauan situasi di terminal upaya menjaga keamanan disekitar terminal, melakukan *rampcheck* untuk pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan umum sebelum berangkat, dan sistem di terminal sudah dilengkapi dengan CCTV untuk kemanan pengguna terminal.

c. Aspek kenyamanan

Sudah tersedia fasilitas-fasilitas penunjang di terminal seperti, ruang tunggu, tempat ibadah, ruang istirahat supir, ruang ibu menyusui dan klinik agar kenyamanan pengguna terminal tetap di utamakan.

d. Aspek sosial

Sifat dan sikap terhadap masyarakat sebagai pengguna terminal harus diterapkan oleh setiap petugas, pelayanan yang ramah dan sopan oleh petugas Terminal Tipe-A BRPS agar terjalin hubungan yang harmonis.

e. Aspek fasilitas sarana dan prasarana

Fasilitas utama dan penunjang sudah tersedia di Terminal Tipe-A BRPS, meskipun beberapa kondisi fasilitas ada yang rusak ringan.

f. Aspek inovasi dalam bekerja

Setiap petugas terminal disaat bertugas sudah memiliki inovasi-inovasi dalam bekerja, seperti aktif dalam memberikan informasi pengumuman, pembagian masker secara gratis, dan mengupload beberapa kegiatan-kegiatan terminal di media sosial.

2. Terminal Tipe-A Bangkinang

Merupakan Terminal Tipe-A pada kelas III dengan pelayanan AKAP dan AKDP lebih kedalam sistem transit atau bersifat lintas dengan luas 3600 m² dan terletak di pusat kota Bangkinang, Kab. Kampar. Terminal Tipe-A Bangkinang memiliki fasilitas utama dan fasilitas pendukung sebagai berikut :

- **Fasilitas Utama :**
 - 1) Jalur Kedatangan & Keberangkatan
 - 2) Ruang Tunggu
 - 3) Area Parkir
 - 4) Perlengkapan Jalan / Rambu
 - 5) Loket Penjualan Tiket
 - 6) Pusat Informasi
 - 7) Gedung Utama/ Kantor
- **Fasilitas Pendukung :**
 - 1) Endapan Bus
 - 2) Fasilitas Keamanan
 - 3) Kios/ Kantin
 - 4) Musholla
 - 5) Toilet
 - 6) Wifi
 - 7) Ruang Laktasi dan Area Bermain Anak

Indikator kerja pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Bangkinang terhadap calon penumpang, penumpang yang singgah/turun, pengunjung dan masyarakat di sekitar lingkungan terminal yaitu:

- a. Aspek pelayanan publik
- b. Aspek keamanan
- c. Aspek kenyamanan
- d. Aspek sosial, dan
- e. Aspek fasilitas sarana dan prasarana
- f. Aspek inovasi dalam bekerja

3. Terminal Tipe-A Dumai

Terminal Dumai terletak di Kota Dumai dan berada pada lokasi yang strategis yaitu berdekatan dengan pelabuhan Kota Dumai, memiliki integrasi dengan moda angkutan penyeberangan. Terminal ini melayani trayek angkutan AKAP dan AKDP.

Terminal Tipe-A Dumai memiliki fasilitas utama dan fasilitas pendukung sebagai berikut :

- **Fasilitas Utama :**
 - 1) Jalur Kedatangan
 - 2) Jalur Keberangkatan
 - 3) Ruang Tunggu
 - 4) Area Parkir
 - 5) Perlengkapan Jalan / Rambu
 - 6) Loket Penjualan Tiket
 - 7) Pusat Informasi
 - 8) Gedung Utama/ Kantor
 - 9) Peron
- **Fasilitas Pendukung :**
 - 1) Endapan Bus
 - 2) Ruang Istirahat Pengemudi
 - 3) Kios/ Kantin
 - 4) Musholla
 - 5) Toilet

Indikator kerja pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Bangkinang terhadap calon penumpang, penumpang yang singgah/turun, pengunjung dan masyarakat di sekitar lingkungan terminal yaitu:

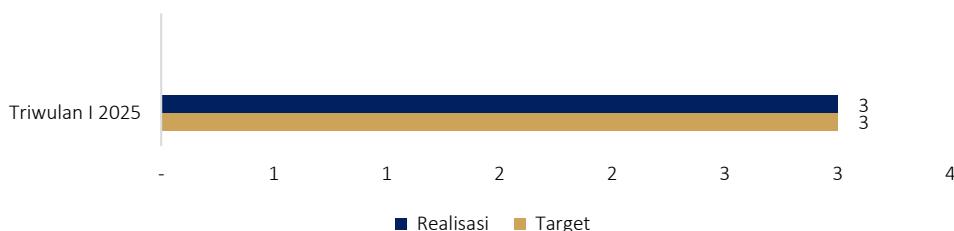
- a. Aspek pelayanan publik
- b. Aspek keamanan
- c. Aspek kenyamanan
- d. Aspek sosial, dan

- e. Aspek fasilitas sarana dan prasarana
- f. Aspek inovasi dalam bekerja

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau tidak memiliki Satuan Pelayanan Terminal Barang.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Triwulan I tahun 2025 sebesar 3 jika dibandingkan dengan target PK Triwulan I tahun 2025 sebesar 3 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi.



Gambar II. 2 Realisasi IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebesar 3 yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
 - Sarana dan prasarana yang memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas.
- Faktor Kegagalan
 - SOP tidak terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
 - Sarana dan prasarana yang tidak memadai;

- Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berintegritas dan berkualitas.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$IKK\ 1.3 = \text{Jumlah terminal tipe - A dan terminal barang yang beroperasi}$$

$$= 3$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Triwulan I Tahun 2025 yaitu Pelaksanaan operasional terminal penumpang dan terminal barang memiliki target keuangan Triwulan I senilai Rp. 1.786.774.750,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2025 Rp. 3.396.491.417,- atau mencapai 47,52%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Upaya peningkatan kinerja oleh petugas di terminal dalam melayani masyarakat sebagai pengguna terminal dengan kekompakan antar pimpinan dan staf di lingkukan organisasi pada Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A,
2. Meningkatkan inovasi-inovasi dalam bekerja serta dukungan dari kemajuan dan pengadaan fasilitas pendukung operasional terminal,
3. Memprioritaskan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa angkutan penumpang di area terminal,
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap Terminal Tipe A di BPTD Kelas II Riau untuk terus memantau kebutuhan dan kerusakan sarana dan prasarana yang perlu segera diperbaiki.

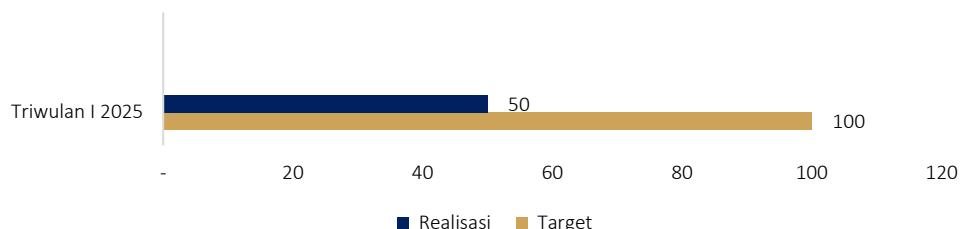
II.2.1.3. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Triwulan I tahun 2025 sebesar 50% jika dibandingkan dengan target PK Triwulan I tahun 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 50%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.



Gambar II. 3 Realisasi IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
 - Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 6838 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2025;
 - Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4744/AP.204/DRJD/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 5856/AP.204/DRJD/2018 tentang Perhitungan dan Prosedur Pembiayaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebesar 100% yang merupakan asumsi arahan

pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

- Faktor Keberhasilan
 - Sarana dan Prasarana yang ada telah memadai;
 - SOP berjalan dengan efektif dan efisien;
 - Jumlah SDM telah memenuhi formasi kebutuhan operasional.
- Faktor Kegagalan
 - Sarana dan Prasarana yang ada belum memadai;
 - SOP tidak berjalan dengan efektif dan efisien;
 - Jumlah SDM belum memenuhi formasi kebutuhan operasional.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{4} \times 100 \% = 50\%$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{50\%}{100\%} \times 100\% = 50\%$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Triwulan I Tahun 2025 yaitu Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan memiliki target keuangan Triwulan I senilai Rp. 3.143.627.000,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan operasional Pelabuhan SDP perintis yang beroperasi,
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang Pelabuhan SDP Perintis,

3. Mengusulkan pagu kebutuhan dengan optimal dan tentunya sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kegiatan layanan angkutan penyeberangan perintis.

II.2.1.4. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi dihitung berdasarkan jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi di wilayah kerja BPTD Kelas II Riau.

Target Jumlah Pelabuhan Penyeberangan di Wilayah Kerja di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau mengacu pada isi DIPA-POK yang telah ditetapkan, meskipun wilayah kerja telah dimekar antara Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, oleh karenanya pada POK yg dimaksud pelabuhan sungai danau dan penyeberangan berjumlah 12 sebagai berikut:

Tabel II. 4 Target Pelabuhan SDP yang Beroperasi di Prov. Riau

No.	Pelabuhan SDP (Satpel)	Pelabuhan SDP (Wilker)
1.	PP Bandar Sri Junjungan (BSJ), Kota Dumai;	
2.		PP Tj. Kapal Rupat, Kab. Bengkalis;
3.		PP Sei Selari, Kab. Bengkalis;
4.		PP Sei Air Putih, Kab. Bengkalis;
5.	PP Tj. Buton Mengkapan, Kab. Siak;	
6.		PP Sagu-Sagu Lukit, Kab. Kepulauan Meranti;
7.		PP Alai Insit, Kab. Kepulauan Meranti;
8.		PP Pecah Buyung, Kab. Kepulauan Meranti;
9.		PP Kampung Balak, Kab. Kepulauan Meranti;
10	PS Sungai Duku, Kota Pekanbaru;	
11.		PS Dumai, Kota Dumai;
12.	PS Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir.	

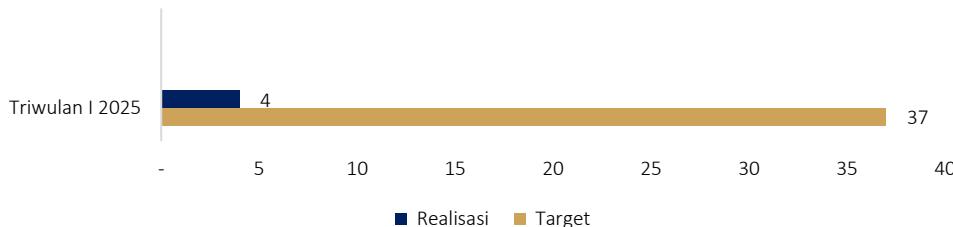
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan, Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan Kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.

Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Triwulan I tahun 2025 sebesar 4 jika dibandingkan dengan target PK Triwulan I tahun 2025 sebesar 37 maka capaian kinerja mencapai 10,81%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.



Gambar II. 4 Realisasi IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. DRJD 3339 Tahun 2021.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebesar 37 yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029 dan juga sesuai dengan yang tertuang pada DIPA-POK. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Sarana dan Prasarana yang ada telah memadai;
 - SOP berjalan dengan efektif dan efisien;
 - Jumlah SDM telah memenuhi formasi kebutuhan operasional.
- Faktor Kegagalan
 - Sarana dan Prasarana yang ada belum memadai;
 - SOP tidak berjalan dengan efektif dan efisien;
 - Jumlah SDM belum memenuhi formasi kebutuhan operasional.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 IKK 1.6 &= \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun} \\
 &\quad \text{dan dioperasikan s.d tahun (n)}
 \end{aligned}$$

$$= 4$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{4}{37} \times 100\% = 10,81\% \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Triwulan I Tahun 2025 yaitu Operasional Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan yang memiliki target keuangan Triwulan I senilai Rp. 1.001.672.500,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2025 Rp. 406.485.115,- atau mencapai 10,15%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan dan operasional Pelabuhan SDP yang beroperasi,
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang Pelabuhan SDP yang beroperasi,
3. Meningkatkan kualitas SDM operasional yang ada pada setiap Pelabuhan.

II.2.2. SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau terdiri atas 3 (tiga) IKK, yaitu:

1. IKK 2.1 : Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A
2. IKK 2.2 : Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A
3. IKK 2.3 : Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II. 5 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat				81,70%		
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A;	%	100	100	62,6	62,6%

	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
IKK 2.2	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A;	%	30	50	60	120%
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP.	%	100	100	62,5	62,5%

II.2.2.1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A

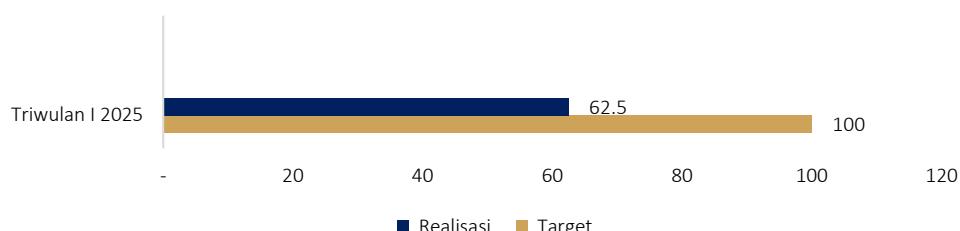
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standar Pelayanan Terminal Penumpang merupakan pedoman bagi penyelenggara terminal angkutan jalan dalam memberikan pelayanan jasa kepada seluruh pengguna terminal.

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A Triwulan I tahun 2025 sebesar 62,6% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 62,5%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.



Gambar II. 5 Grafik Realisasi IKK Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

- PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025
Adapun target IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebesar 100% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
 - Sarana dan prasarana yang memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas.
- Faktor Kegagalan
 - SOP tidak terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
 - Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berintegritas dan berkualitas.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan dilaksanakan pada masing-masing terminal penumpang di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.6 Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Tipe-A BRPS

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BRPS			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
1	Keselamatan							
	a. Lajur Pejalan Kaki	Lajur Pejalan Kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia lajur Pejalan kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor	Tidak Tersedia	0	1	0%
	b. Fasilitas Keselamatan Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan (rambu, marka, Penerangan Jalan, Pagar)	Ketersediaan	Tersedia fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, penerangan jalan, pagar)	Tersedia	2	2	100%
	c. Jalur Evakuasi	Jalur Evakuasi	Ketersediaan	Tersedia Jalur Evakuasi	Tersedia	2	1	200%
	d. Alat Pemadam Kebakaran	Alat Pemadam Kebakaran	Ketersediaan	Tersedia Alat Pemadam kebakaran	Tersedia	2	2	100%
	e. Pos, fasilitas dan petugas Kesehatan	Pos, fasilitas dan petugas Kesehatan	Ketersediaan	tersedia Pos, fasilitas dan petugas Kesehatan	Tersedia	1	1	100%
	f. Pos, Fasilitas dan petugas Pemeriksa Kelaikan Kendaraan Umum	Pos, Fasilitas dan petugas Pemeriksa Kelaikan Kendaraan Umum	Ketersediaan	tersedia Pos, Fasilitas dan petugas Pemeriksa Kelaikan Kendaraan Umum	Tidak Tersedia	0	1	0%
	g. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Ketersediaan	tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Tidak Tersedia	0	1	0%
	h. Informasi Fasilitas keselamatan	Informasi Ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan)	Ketersediaan	tersedia informasi fasilitas keselamatan, petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang mudah terlihat dengan jelas	Tidak Tersedia	0	1	0%
	i. Informasi fasilitas Kesehatan	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat	Ketersediaan	tersedia informasi fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dengan jelas	Tersedia	1	1	100%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BRPS			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
	j. Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Informasi Ketersediaan fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Ketersediaan	tersedia informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor yang mudah terlihat dengan jelas	Tidak Tersedia	0	1	0%
2	Keamanan							
	a. fasilitas Keamanan	Fasilitas pencegah tindak kriminal	Ketersediaan	Tersedia pos keamanan, kamera pengawas, dan titik pengamanan tertentu	Tersedia	1	1	100%
	b. Media pengaduan gangguan keamanan	informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan / atau SMS pengaduan yang ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat	Ketersediaan	Tersedia stiker pada tempat yang strategis, mudah terlihat dan jelas terbaca	Tersedia	2	2	100%
	c. Petugas Keamanan	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa	Ketersediaan petugas	Minimal 2 (dua) petugas berseragam dan mudah terlihat	Tersedia	1	1	100%
3	Kehandalan/ Keteraturan							
	a. Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan	Tersedianya Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Tidak Tersedia	0	1	0%
			Keteraturan		Belum Terpenuhi	0	1	0%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BRPS			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
	b. Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan	Tersedianya Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Tidak Tersedia	0	1	0%
			Keteraturan		Belum Terpenuhi	0	1	0%
	c. Loket Penjualan tiket	Loket Tempat calon penumpang membeli tiket	Ketersediaan	Loket penjualan tiket tetap dan teratur	Tersedia	2	2	100%
			Keteraturan		Terpenuhi	2	2	100%
	d. Kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal	Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal	Ketersediaan	- Tersedia kantor penyelenggara terminal, control room dan SIM terminal	Tersedia	2	2	100%
			Luas		Terpenuhi	2	2	100%
	e. Petugas Operasional Terminal	Petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal	Ketersediaan	Tersedia petugas Operasional terminal yang mengatur operasional terminal	Tersedia	2	2	100%
			Keteraturan		Teratur	2	2	100%
4	Kenyamanan							
	a. Ruang Tunggu	Ruangan/tempat yang	Ketersediaan	Tersedia tempat duduk	Tersedia	2	2	100%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BRPS			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
		disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)	Kondisi	Area bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal	Tidak Tersedia	0	2	0%
			Keteraturan	Dilakukan kanalisasi penumpang, dan diklasifikasikan berdasarkan zona	Tidak Tersedia	0	2	0%
b. Toilet		Tersedianya Toilet	Jumlah	Pria (4 Urinoir,3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 westafel)	Tersedia	2	2	100%
				Wanita (6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 westafel)	Tersedia	2	2	100%
			Kondisi	Area bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal	Berbau	0,7	2	35%
c. Fasilitas peribadatan / mushola		Fasilitas untuk melakukan ibadah	Luas	Pria (11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Wanita (9 normal dan 2 penyandang disabilitas)	Tersedia	2	2	100%
			Kondisi	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal	Terpenuhi	2	2	100%
d. Ruang terbuka hijau		Ruang terbuka hijau disediakan untuk area penghijauan	Ketersediaan	Tersedia ruang hijau minimal 30% luas lahan	Tersedia	2	2	100%
			Luas	Terdapat alat-alat kebersihan, penyiraman taman	Terpenuhi	2	2	100%
			Kondisi	Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah	Tidak Tersedia	0	1	0%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BRPS			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
	e. Rumah makan	Rumah makan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan	Tersedia	2	2	100%
	f. Fasilitas dan Petugas Kebersihan	Fasilitas dan Petugas Kebersihan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas dan Petugas Kebersihan	Tersedia	2	2	100%
	g. Tempat istirahat awak kendaraan	Tempat istirahat awak kendaraan	Ketersediaan	Tempat istirahat awak kendaraan	Tersedia	2	2	100%
	h. Area merokok(smoking area)	tempat khusu untuk merokok	Ketersediaan	Tersedia smoking area	Tidak Tersedia	0	1	0%
	i. Drainase	drainase yang memadai	Ketersediaan	Tersedia drainase yang memadai	Tersedia	2	2	100%
	j. Area dengan jaringan internet (hot spot area)	area yang tersedia jaringan internet (hot spot area)	Ketersediaan	Tersedia hot spot area	Tidak Tersedia	0	1	0%
	k. Ruang baca (reading corner)	ruang baca (reading corner)	Ketersediaan	Tersedia ruang baca (reading corner)	Tidak Tersedia	0	1	0%
	l. Lampu penerangan ruangan	lampu penerangan ruangan	Ketersediaan	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi	Tidak Tersedia	0	2	0%
5	Kemudahan							
	a. Letak jalur pemberangkatan	Kapasitas letak jalur pemberangkatan kendaraan	Keteraturan	-Letak jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur	Terpenuhi	2	2	100%
				-Terpisah dengan jalur penurunan penumpang	Tidak Terpenuhi	0	2	0%
				-Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain	Tidak Terpenuhi	0	2	0%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BRPS			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
b.	Letak jalur kedatangan	Kepastian letak kedatangan kendaraan	Keteraturan	-Letak jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur	Terpenuhi	2	2	100%
				-Terpisah dengan jalur penurunan penumpang	Tidak Terpenuhi	0	2	0%
				-Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain	Tidak Terpenuhi	0	2	0%
c.	Informasi Pelayanan	Visual: - Denah/ Layout terminal -Nomor Trayek, Nama PO dan Kelas Pelayanannya - Nama Terminal Keberangkatan - Jadwal - tarif -Peta Jaringan	Tempat / Ruang	Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, dipintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan terbaca	Tidak Tersedia	0	2	0%
		Audio : -Informasi Pelayanan (disebutkan apa saja) - Kejadian khusus dan gangguan	Tempat dan intensitas cahaya	Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	Tersedia	2	2	100%
d.	informasi angkutan lanjutan	informasi yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat : - Jenis Angkutan- Lokasi Angkutan Lanjutan -Jam Pelayanan Angkutan Lanjutan -Jurusian/rute - tarif	Tempat	Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca	Tersedia	2	2	100%
			Kondisi		Kurang Baik	0,5	2	25%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BRPS			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
	e. Informasi gangguan perjalanan mobil bus	fasilitas dalam terminal yang memberikan informasi penyebab keterlambatan jadwal perjalanan mobil bus seperti gangguan keamanan, operasional dan keselamatan	Intensitas Suara	informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	Tersedia	2	2	100%
	f. Tempat penitipan barang	Tempat penitipan barang	Ketersediaan	Tersedia tempat penitipan barang sesuai kebutuhan	Tidak Tersedia	0	2	0%
	g. Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Ketersediaan	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Tersedia	1	1	100%
	h. Tempat naik/turun penumpang	Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus	Aksesibilitas	Tinggi platform sama dengan tinggi lantai bus	Tidak Tersedia	0	2	0%
	i. Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	Tempat parkir untuk kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	Ketersediaan	Terdisedia tempat parkir dengan luas disesuaikan dengan lahan yang tersedia	Tersedia	2	2	100%
6	Kesetaraan							
	a. fasilitas Penyandang cacat (difabel)	Fasilitas yang disediakan untuk pengguna jasa difabel	Aksesibilitas	-Terdapat ramp portable atau ramp permanen dengan kemiringan maksimum 20° untuk penyambung dari platform ke kendaraan -Toilet pengguna difable -Kursi roda difable	Tidak Tersedia	0	1	0%
					Tidak Tersedia	0	1	0%
					Tersedia	2	2	100%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BRPS			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
	b. Ruang ibu menyusui	Ruangan/ tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi	Ketersediaan	tersedia ruang tertutup khusus beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui dan bayi	Tersedia	1	1	100%
TOTAL						63,2	100	63,20%

Tabel II.7 Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Tipe-A Bangkinang

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BANGKINANG			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
1	Keselamatan							
	a. Lajur Pejalan Kaki	Lajur Pejalan Kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia lajur Pejalan kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor	Tersedia	1	1	100%
	b. Fasilitas Keselamatan Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan (rambu, marka, Penerangan Jalan, Pagar)	Ketersediaan	Tersedia fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, penerangan jalan, pagar)	Tersedia	2	2	100%
	c. Jalur Evakuasi	Jalur Evakuasi	Ketersediaan	Tersedia Jalur Evakuasi	Tidak Tersedia	1	1	100%
	d. Alat Pemadam Kebakaran	Alat Pemadam Kebakaran	Ketersediaan	Tersedia Alat Pemadam kebakaran	Tersedia	2	2	100%
	e. Pos, fasilitas dan petugas Kesehatan	Pos, fasilitas dan petugas Kesehatan	Ketersediaan	tersedia Pos, fasilitas dan petugas Kesehatan	Tidak Tersedia	0	1	0%
	f. Pos, Fasilitas dan petugas Pemeriksa Kelaikan Kendaraan Umum	Pos, Fasilitas dan petugas Pemeriksa Kelaikan Kendaraan Umum	Ketersediaan	tersedia Pos, Fasilitas dan petugas Pemeriksa Kelaikan Kendaraan Umum	Tersedia	1	1	100%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BANGKINANG			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
	g. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Ketersediaan	Tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Tidak Tersedia	0	1	0%
	h. Informasi Fasilitas keselamatan	Informasi Ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan)	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas keselamatan, petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang mudah terlihat dengan jelas	Tersedia	1	1	100%
	i. Informasi fasilitas Kesehatan	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dengan jelas	Tidak Tersedia	0	1	0%
	j. Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Informasi Ketersediaan fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor yang mudah terlihat dengan jelas	Tidak Tersedia	0	1	0%
2	Keamanan							
	a. fasilitas Keamanan	Fasilitas pencegah tindak kriminal	Ketersediaan	Tersedia pos keamanan, kamera pengawas, dan titik pengamanan tertentu	Tersedia	1	1	100%
	b. Media pengaduan gangguan keamanan	informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan / atau SMS pengaduan yang ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat	Ketersediaan	Tersedia stiker pada tempat yang strategis, mudah terlihat dan jelas terbaca	Tidak Tersedia	0	2	0%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BANGKINANG			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
	c. Petugas Keamanan	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa	Ketersediaan petugas	Minimal 2 (dua) petugas berseragam dan mudah terlihat	Tersedia	1	1	100%
3	Kehandalan/Keteraturan							
	a. Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan	Tersedianya Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Tersedia	1	1	100%
					Terpenuhi	1	1	100%
	b. Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan	Tersedianya Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Tersedia	1	1	100%
					Terpenuhi	1	1	100%
	c. Loket Penjualan tiket	Loket Tempat calon penumpang membeli tiket	Ketersediaan	Loket penjualan tiket tetap dan teratur	Tersedia	2	2	100%
					Terpenuhi	2	2	100%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BANGKINANG			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
	d. Kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal	Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal	Ketersediaan	-Tersedia kantor penyelenggara terminal, control room dan SIM terminal	Tersedia	2	2	100%
			Luas	- Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai	Terpenuhi	2	2	100%
	e. Petugas Operasional Terminal	Petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal	Ketersediaan	Tersedia petugas Operasional terminal yang mengatur operasional terminal	Tersedia	2	2	100%
			Keteraturan		Terpenuhi	2	2	100%
4	Kenyamanan							
	a. Ruang Tunggu	Ruang/tempat yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)	Ketersediaan	Tersedia tempat duduk	Tersedia	2	2	100%
			Kondisi	Area bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal	Terpenuhi	2	2	100%
			Keteraturan	dilakukan kanalisasi penumpang, dan diklasifikasikan berdasarkan zona	Terpenuhi	2	2	100%
	b. Toilet	Tersedianya Toilet	Jumlah	Pria (4 Urinoir,3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 westafel)	Tersedia	2	2	100%
				Wanita (6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 westafel)	Tersedia	2	2	100%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BANGKINANG			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
c. Fasilitas peribadatan / mushola	Fasilitas untuk melakukan ibadah	Luas	Kondisi	Area bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal	Tersedia	2	2	100%
			Kondisi	Pria (11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Wanita (9 normal dan 2 penyandang disabilitas)	Terpenuhi	2	2	100%
			Kondisi	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal	Terpenuhi	2	2	100%
d. Ruang terbuka hijau	Ruang terbuka hijau disediakan untuk area penghijauan	Ketersediaan		Tersedia ruang hijau minimal 30% luas lahan	Tersedia	2	2	100%
			Luas	Terdapat alat-alat kebersihan, penyiraman taman	Tersedia	2	2	100%
			Kondisi	Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah	Terpenuhi	1	1	100%
e. Rumah makan	Rumah makan	Ketersediaan		Tersedia fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan	Tersedia	2	2	100%
f. Fasilitas dan Petugas Kebersihan	Fasilitas dan Petugas Kebersihan	Ketersediaan		Tersedia fasilitas dan Petugas Kebersihan	Tersedia	2	2	100%
g. Tempat istirahat awak kendaraan	Tempat istirahat awak kendaraan	Ketersediaan		Tempat istirahat awak kendaraan	Tersedia	2	2	100%
h. Area merokok (smoking area)	tempat khusu untuk merokok	Ketersediaan		Tersedia smoking area	Tersedia	1	1	100%
i. Drainase	drainase yang memadai	Ketersediaan		Tersedia drainase yang memadai	Tersedia	2	2	100%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BANGKINANG			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
	j. Area dengan jaringan internet (hot spot area)	area yang tersedia jaringan internet (hot spot area)	Ketersediaan	Tersedia hot spot area	Tidak Tersedia	0	1	0%
	k. Ruang baca (reading corner)	ruang baca (reading corner)	Ketersediaan	Tersedia ruang baca (reading corner)	Tersedia	1	1	100%
	l. Lampu penerangan ruangan	lampu penerangan ruangan	Ketersediaan	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi	Tersedia	2	2	100%
5	Kemudahan							
	a. Letak jalur pemberangkatan	Kapasitas letak jalur pemberangkatan kendaraan	Keteraturan	-Letak jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur	Tersedia	2	2	100%
				-Terpisah dengan jalur penurunan penumpang	Belum Terpenuhi	0	2	0%
				-Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain	Belum Terpenuhi	0	2	0%
	b. Letak jalur kedatangan	Kepastian letak kedatangan kendaraan	Keteraturan	-Letak jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur	Tersedia	2	2	100%
				-Terpisah dengan jalur penurunan penumpang	Belum Terpenuhi	0	2	0%
				- Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain	Belum Terpenuhi	0	2	0%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BANGKINANG			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
	c. Informasi Pelayanan	Visual: - Denah/ Layout terminal -Nomor Trayek, Nama PO dan Kelas Pelayanannya - Nama Terminal Keberangkatan - Jadwal - tarif -Peta Jaringan	Tempat / Ruang	Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, dipintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan terbaca	Tersedia	2	2	100%
		Audio : -Informasi Pelayanan (disebutkan apa saja) - Kejadian khusus dan gangguan	Tempat dan intensitas cahaya	Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	Tersedia	2	2	100%
	d. informasi angkutan lanjutan	informasi yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat : - Jenis Angkutan- Lokasi Angkutan Lanjutan -Jam Pelayanan Angkutan Lanjutan -Jurusan/rute - tarif	Tempat	Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca	Tersedia	2	2	100%
			Kondisi		Baik	2	2	100%
	e. Informasi gangguan perjalanan mobil bus	fasilitas dalam terminal yang memberikan informasi penyebab keterlambatan jadwal perjalanan mobil bus seperti gangguan keamanan, operasional dan keselamatan	Intensitas Suara	Informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	Tersedia	2	2	100%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A BANGKINANG			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
6	f. Tempat penitipan barang	Tempat penitipan barang	Ketersediaan	Tersedia tempat penitipan barang sesuai kebutuhan	Tidak Tersedia	0	2	0%
	g. Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Ketersediaan	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Tersedia	1	1	100%
	h. Tempat naik/turun penumpang	Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus	Aksesibilitas	Tinggi platform sama dengan tinggi lantai bus	Tidak Tersedia	0	2	0%
	i. Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	Tempat parkir untuk kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	Ketersediaan	Terdedia tempat parkir dengan luas disesuaikan dengan lahan yang tersedia	Tersedia	2	2	100%
6	Kesetaraan							
	a. fasilitas Penyandang cacat (difabel)	Fasilitas yang disediakan untuk pengguna jasa difabel	Aksesibilitas	-Terdapat ramp portable atau ramp permanen dengan kemiringan maksimum 200 untuk penyambung dari platform ke kendaraan	Tidak Tersedia	0	1	0%
				-Toilet pengguna difable	Tidak Tersedia	0	1	0%
				-Kursi roda difable	Tersedia	2	2	100%
	b. Ruang ibu menyusui	Ruangan/ tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi	Ketersediaan	Tersedia ruang tertutup khusus beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui dan bayi	Tersedia	1	1	100%
TOTAL						79	100	79%

Tabel II.8 Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Tipe-A Dumai

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A DUMAI			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
1	Keselamatan							
	a. Lajur Pejalan Kaki	Lajur Pejalan Kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia lajur Pejalan kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor	Tersedia	1	1	100%
	b. Fasilitas Keselamatan Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan (rambu, marka, Penerangan Jalan, Pagar)	Ketersediaan	Tersedia fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, penerangan jalan, pagar)	Tersedia	2	2	100%
	c. Jalur Evakuasi	Jalur Evakuasi	Ketersediaan	Tersedia Jalur Evakuasi	Tidak Tersedia	0	1	0%
	d. Alat Pemadam Kebakaran	Alat Pemadam Kebakaran	Ketersediaan	Tersedia Alat Pemadam kebakaran	Tersedia	2	2	100%
	e. Pos, fasilitas dan petugas Kesehatan	Pos, fasilitas dan petugas Kesehatan	Ketersediaan	Tersedia Pos, fasilitas dan petugas Kesehatan	Tidak Tersedia	0	1	0%
	f. Pos, Fasilitas dan petugas Pemeriksa Kelaikan Kendaraan Umum	Pos, Fasilitas dan petugas Pemeriksa Kelaikan Kendaraan Umum	Ketersediaan	Tersedia Pos, Fasilitas dan petugas Pemeriksa Kelaikan Kendaraan Umum	Tersedia	1	1	100%
	g. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Ketersediaan	Tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Tersedia	1	1	100%
	h. Informasi Fasilitas keselamatan	Informasi Ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan)	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas keselamatan, petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang mudah terlihat dengan jelas	Tidak Tersedia	0	1	0%
	i. Informasi fasilitas Kesehatan	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dengan jelas	Tidak Tersedia	0	1	0%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A DUMAI			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
	j. Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Informasi Ketersediaan fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor yang mudah terlihat dengan jelas	Tidak Tersedia	0	1	0%
2	Keamanan							
	a. fasilitas Keamanan	Fasilitas pencegah tindak kriminal	Ketersediaan	Tersedia pos keamanan, kamera pengawas, dan titik pengamanan tertentu	Tidak Tersedia	0	1	0%
	b. Media pengaduan gangguan keamanan	informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan / atau SMS pengaduan yang ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat	Ketersediaan	Tersedia stiker pada tempat yang strategis, mudah terlihat dan jelas terbaca	Tidak Tersedia	0	2	0%
	c. Petugas Keamanan	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa	Ketersediaan petugas	Minimal 2 (dua) petugas berseragam dan mudah terlihat	Tersedia	1	1	100%
3	Kehandalan/ Keteraturan							
	a. Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan	Tersedianya Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Tidak Tersedia	0	1	0%
			Keteraturan		Belum terpenuhi	0	1	0%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A DUMAI			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
	b. Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan	Tersedianya Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Tidak Tersedia	0	1	0%
			Keteraturan		Belum terpenuhi	0	1	0%
	c. Loket Penjualan tiket	Loket Tempat calon penumpang membeli tiket	Ketersediaan	Loket penjualan tiket tetap dan teratur	Tersedia	2	2	100%
			Keteraturan		Terpenuhi	2	2	100%
	d. Kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal	Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal	Ketersediaan	-Tersedia kantor penyelenggara terminal, control room dan SIM terminal	Tersedia	2	2	100%
			Luas		Terpenuhi	2	2	100%
	e. Petugas Operasional Terminal	Petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal	Ketersediaan	Tersedia petugas Operasional terminal yang mengatur operasional terminal	Tersedia	2	2	100%
			Keteraturan		Terpenuhi	2	2	100%
4	Kenyamanan							
	a. Ruang Tunggu	Ruang/tempat yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau	Ketersediaan	Tersedia tempat duduk	Tersedia	2	2	100%
			Kondisi	Area bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal	Terpenuhi	2	2	100%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A DUMAI			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
		ruangan terbuka)	Keteraturan	dilakukan kanalisasi penumpang, dan diklasifikasikan berdasarkan zona	Terpenuhi	2	2	100%
b. Toilet	Tersedianya Toilet	Jumlah	Pria (4 Urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 westafel)	Tersedia	2	2	100%	
			Wanita (6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 westafel)	Tersedia	2	2	100%	
		Kondisi	Area bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal	Berbau	0,6	2	30%	
c. Fasilitas peribadatan / mushola	Fasilitas untuk melakukan ibadah	Luas	Pria (11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Wanita (9 normal dan 2 penyandang disabilitas)	Tersedia	2	2	100%	
		Kondisi	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal	Terpenuhi	2	2	100%	
d. Ruang terbuka hijau	Ruang terbuka hijau disediakan untuk area penghijauan	Ketersediaan	Tersedia ruang hijau minimal 30% luas lahan	Tersedia	2	2	100%	
		Luas	Terdapat alat-alat kebersihan, penyiraman taman	Tersedia	2	2	100%	
		Kondisi	Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah	Tidak Tersedia	0	1	0%	
e. Rumah makan	Rumah makan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan	Tersedia	2	2	100%	
f. Fasilitas dan Petugas Kebersihan	Fasilitas dan Petugas Kebersihan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas dan Petugas Kebersihan	Tersedia	2	2	100%	

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A DUMAI			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
	g. Tempat istirahat awak kendaraan	Tempat istirahat awak kendaraan	Ketersediaan	Tempat istirahat awak kendaraan	Tersedia	2	2	100%
	h. Area merokok (smoking area)	tempat khusu untuk merokok	Ketersediaan	Tersedia smoking area	Tidak Tersedia	0	1	0%
	i. Drainase	drainase yang memadai	Ketersediaan	Tersedia drainase yang memadai	Tersedia	2	2	100%
	j. Area dengan jaringan internet (hot spot area)	area yang tersedia jaringan internet (hot spot area)	Ketersediaan	Tersedia hot spot area	Tidak Tersedia	0	1	0%
	k. Ruang baca (reading corner)	ruang baca (reading corner)	Ketersediaan	Tersedia ruang baca (reading corner)	Tidak Tersedia	0	1	0%
	l. Lampu penerangan ruangan	lampu penerangan ruangan	Ketersediaan	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi	Tersedia	2	2	100%
5	Kemudahan							
	a. Letak jalur pemberangkatan	Kapasitas letak jalur pemberangkatan kendaraan	Keteraturan	-Letak jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur	Terpenuhi	2	2	100%
				-Terpisah dengan jalur penurunan penumpang	Terpenuhi	2	2	100%
				-Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain	Terpenuhi	2	2	100%
	b. Letak jalur kedatangan	Kepastian letak kedatangan kendaraan	Keteraturan	-Letak jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur	Terpenuhi	2	2	100%
				-Terpisah dengan jalur penurunan penumpang	Terpenuhi	2	2	100%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A DUMAI			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
	c. Informasi Pelayanan	Visual: - Denah/ Layout terminal -Nomor Trayek, Nama PO dan Kelas Pelayanannya - Nama Terminal Keberangkatan - Jadwal - tarif -Peta Jaringan	Tempat / Ruang	- Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain	Terpenuhi	2	2	100%
					Tidak Tersedia	0	2	0%
	d. Informasi angkutan lanjutan	informasi yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat : - Jenis Angkutan- Lokasi Angkutan Lanjutan -Jam Pelayanan Angkutan Lanjutan -Jurusan/rute - tarif	Tempat Kondisi	Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, dipintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan terbaca	Tidak Tersedia	0	2	0%
					Belum terpenuhi	0	2	0%
	e. Informasi gangguan perjalanan mobil bus	fasilitas dalam terminal yang memberikan informasi penyebab keterlambatan jadwal perjalanan mobil bus seperti gangguan keamanan, operasional	Intensitas Suara	informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	Tidak Tersedia	0	2	0%

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR INDIKATOR	TERMINAL TIPE-A DUMAI			
					REALISASI	POIN REALISASI	POIN TARGET	CAPAIAN
		dan keselamatan						
	f. Tempat penitipan barang	Tempat penitipan barang	Ketersediaan	Tersedia tempat penitipan barang sesuai kebutuhan	Tidak Tersedia	0	2	0%
	g. Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Ketersediaan	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Tersedia	1	1	100%
	h. Tempat naik/turun penumpang	Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus	Aksesibilitas	Tinggi platform sama dengan tinggi lantai bus	Tersedia	2	2	100%
	i. Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	Tempat parkir untuk kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	Ketersediaan	Terdisedia tempat parkir dengan luas disesuaikan dengan lahan yang tersedia	Tersedia	2	2	100%
6	Kesetaraan							
	a. Fasilitas Penyandang cacat (difabel)	Fasilitas yang disediakan untuk pengguna jasa difabel	Aksesibilitas	Terdapat ramp portable atau ramp permanen dengan kemiringan maksimum 20° untuk penyambung dari platform ke kendaraan	Tidak Tersedia	0	1	0%
				-Toilet pengguna difable	Tersedia	1	1	100%
				-Kursi roda difable	Tidak Tersedia	0	2	0%
	b. Ruang ibu menyusui	Ruangan/ tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi	Ketersediaan	Tersedia ruang tertutup khusus beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui dan bayi	Tidak Tersedia	0	1	0%
TOTAL						66,6	100	66,6%

Sehingga Realisasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di TTA} = \frac{\underline{63,2 + 79 + 66,6}}{\underline{100}} = 62,6\%$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{62,6\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{62,6\%}\end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A Triwulan I Tahun 2025 melekat pada anggaran Operasional Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A yang memiliki target keuangan Triwulan I senilai Rp. 1.786.774.750,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2025 Rp. 3.396.491.417,- atau mencapai 47,52%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas terhadap fasilitas yang telah tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal Tipe-A;
2. Melengkapi fasilitas yang belum tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal Tipe-A; dan
3. Mengoptimalkan implementasi SOP yang ada dan meningkatkan kualitas SDM di Terminal Tipe-A.

II.2.2.2. IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe-A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe-A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 7

(tujuh) item, yaitu : *Vending Machine, Passenger Barier Gate, Vehicle Barrier Gate, CCTV, Counting Passenger, Information Display.*

$$IKK\ 2.2 = \left(\frac{\text{Persentase TTA online} \times 50\%}{\text{TTA online}} \right) + \left(\frac{\text{Persentase TTA yang telah dipasang perangkat digitalisasi Terminal} \times 50\%}{\text{Terminal x 50\%}} \right)$$

$$\text{Percentase TTA Online} = \frac{\frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%}{}$$

Penilaian Penerapan SMART Terminal Tipe-A (SMART) :

NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT
1	<i>Vending Machine</i>	20%
2	<i>Passenger Barrier Gate</i>	20%
3	<i>Vehicle Barrier Gate</i>	20%
4	<i>CCTV</i>	10%
5	<i>Counting Passenger</i>	10%
6	<i>Information Display</i>	20%

Identifikasi Penerapan SMART Terminal Tipe-A yang sesuai dengan era saat ini merupakan pemenuhan sarana dan prasarana Terminal yang mengembangkan dan mengoptimalkan fasilitas berbasis teknologi serta *connected* Terminal yang saling terhubung guna memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna Terminal. Selanjutnya terminal tidak hanya dijadikan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi, namun terminal juga dijadikan sebagai tempat destinasi makanan hingga tempat perbelanjaan.

Fasilitas Terminal Penumpang berbasis teknologi dimulai dari pelayanan awal Penumpang atau pengguna jasa terminal masuk sampai dengan meninggalkan Terminal, seluruhnya diberikan akses atau bantuan kepada Pengguna jasa Transportasi di terminal dengan teknologi sehingga mendorong *Flow Mobilitas* Penumpang secara mandiri. Dukungan kecanggihan teknologi hal ini sangat diperlukan mulai dari fasilitas CCTV, *sensor screening*, *check in*, dan informasi lainnya bagi penumpang dan pengguna jasa lainnya di Terminal. Pelaksanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Terminal tentunya sangat berpengaruh dan sebagai wujud Penerapan SMART Terminal Tipe-A, tentunya hal tersebut perlunya persiapan menyeluruh yang dapat menunjang standarisasi pelayanan minimal untuk meningkatkan potensi yang ada di Terminal. Pada Terminal Tipe-A pun kini telah diterapkan pula *Terminal Online System* (TOS), aplikasi yang digunakan untuk penginputan data operasional terminal.

Terminal Tipe-A yang berada pada ruang lingkup kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau adalah sebagai berikut :

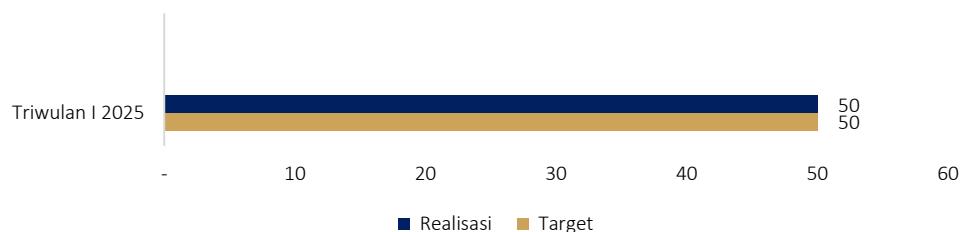
1. Terminal Tipe – A Bandar Raya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
2. Terminal Tipe – A Dumai, Kota Dumai Prov. Riau;
3. Terminal Tipe – A Bangkinang, Kab. Kampar Prov. Riau.

Infrastruktur transportasi di Indonesia masih perlu banyak pembenahan dan perhatian khusus. Selain jumlahnya kurang memadai, dari aspek kualitas pelayanan infrastruktur tersebut masih cukup memprihatinkan. Perlu adanya upaya dan kiat penyelamatan infrastruktur transportasi di negara Indonesia, agar eksistensinya dapat memberi manfaat dan menunjang pembangunan. Salah satu cara yang sangat penting dan mendasar adalah penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) infrastruktur transportasi. SPM berperan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi khususnya terminal penumpang transportasi jalan guna pemenuhan dalam SMART Terminal. SPM meliputi dua aspek yaitu:

1. Lokasi dan letak, aksesibilitas, dan lahan terminal; dan
2. Fasilitas Terminal.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Penerapan SMART Terminal Tipe-A Triwulan I tahun 2025 sebesar 50% jika dibandingkan dengan target PK Triwulan I tahun 2025 sebesar 50% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.



Gambar II. 6 Realisasi IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
 - PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.
 - PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebesar 50% yang

merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

- Faktor Keberhasilan
 - SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
 - Sarana dan prasarana telah memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas.
- Faktor Kegagalan
 - SOP tidak terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
 - Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berintegritas dan berkualitas.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Persentase TTA Online} = \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{50\%}{50\%} \times 100\% = 100\%$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Triwulan I Tahun 2025 melekat pada anggaran operasional terminal tipe-A yang memiliki target keuangan Triwulan I senilai Rp. 1.786.774.750,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2025 Rp. 3.396.591.417,- atau mencapai 47,52%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun Upaya yang dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau untuk meningkatkan capaian di masa depan dalam menerapkan SMART Terminal adalah :

1. Melakukan usulan anggaran;

2. Melakukan usulan *Detail Engineering Detail* (DED);
3. Melakukan *Feasibility Study* di Terminal Tipe-A di wilayah Kerja BPTD IV;
4. Melakukan pembangunan dan pengembangan terhadap Gedung utama;
5. Melakukan pembangunan *bridge* penghubung antar moda;
6. Memanfaatkan lahan-lahan terminal sebagai pemenuhan penerapan SMART Terminal.

Sehingga Terminal Tipe-A pada wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau dapat terealisasi menjadi SMART Terminal Tipe-A yang memberikan kemudahan dan kenyamanan pada pengguna angkutan umum dan pengguna jasa Terminal.

II.2.2.3. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP

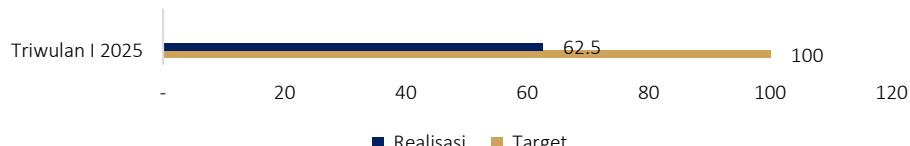
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 (empat belas) Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakahueni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-API, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.

Selanjutnya diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Triwulan I tahun 2025 sebesar 62,5% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 62,5%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Pelabuhan SDP.



Gambar II. 7 Grafik Realisasi IKK Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
 - PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebesar 100% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki Kualifikasi terkait Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP;
 - Terjadinya Sistem Digitalisasi terhadap pengisian Formulir Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sehingga mempermudah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP;
 - Tersedianya Sumber Daya Manusia untuk melakukan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP.
- Faktor Kegagalan
 - Masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP;
 - Tidak adanya Sistem Digitalisasi terhadap pengisian Formulir Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP;
 - Tidak adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi terkait pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal di Pelabuhan SDP.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 IKK\ 2.3 &= \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang dipantau}} \times 100\% \\
 &= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{67.5\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{67.5\%}\end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Triwulan I Tahun 2025 melekat pada anggaran operasional pelabuhan SDP yang memiliki target keuangan Triwulan I senilai Rp. 1.001.672.500,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2025 Rp. 406.485.115,- atau mencapai 10,15%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas terhadap fasilitas yang telah tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP;
2. Melengkapi fasilitas yang belum tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP;
3. Mengoptimalkan implementasi SOP yang ada di pelabuhan SDP.

II.2.3. SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

II.2.3.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

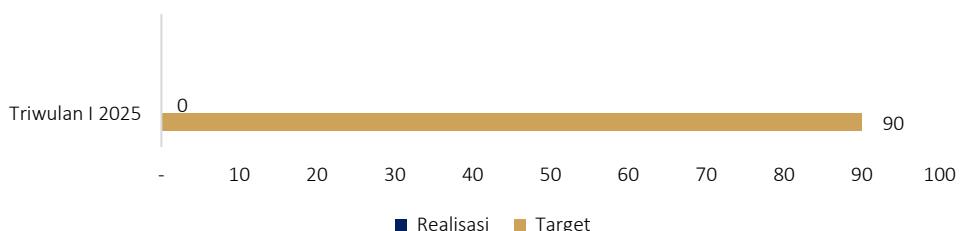
Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi :

- 1) Marka Jalan;
- 2) Rambu Lalu Lintas;
- 3) Patok Lalu Lintas;
- 4) Paku Jalan;
- 5) Pagar Pengaman Jalan;

- 6) Alat Penerangan Jalan;
- 7) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
- 8) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas;
- 9) Cermin Tikungan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal berupa Kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Provinsi Riau Tahun 2025 dilaksanakan pada beberapa Ruas Jalan Nasional. Pada Triwulan I ini dapat dilaporkan bahwa realisasi kinerja perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal di Provinsi Riau masih pada realisasi 0%. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden untuk melaksanakan efisiensi anggaran diseluruh instansi pemerintahan yang ada di Pusat maupun daerah yang ada di seluruh Indonesia.



Gambar II. 8 Realisasi IKK Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2025 – 2029;
 - PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebesar 90% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Tersedianya anggaran;
 - Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
 - Optimalnya pengawasan pembangunan.

- Faktor Kegagalan
 - Tidak adanya anggaran;
 - Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
 - Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK\ 3.1 &= \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\% \\ &= \frac{0\%}{9} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Triwulan I tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0\%}{90\%} \times 100\% = 0\%$$

- Perhitungan Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Triwulan I tahun 2025 yaitu Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal memiliki target keuangan Triwulan I senilai Rp. 2.778.250.000,- dengan realisasi hingga Triwulan I tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja capaian Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi bersama pihak penyedia untuk selalu menjaga kualitas dan berupaya menyesuaikan target pekerjaan;
2. Melakukan review berkala untuk beberapa periode untuk koreksi sepanjang progress kerja berjalan; dan
3. Menyampaikan laporan progress secara berkala serta dengan melakukan monitoring ke lapangan untuk dapat segera mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang kiranya dapat menghambat keberhasilan pekerjaan.

II.2.3.2. IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

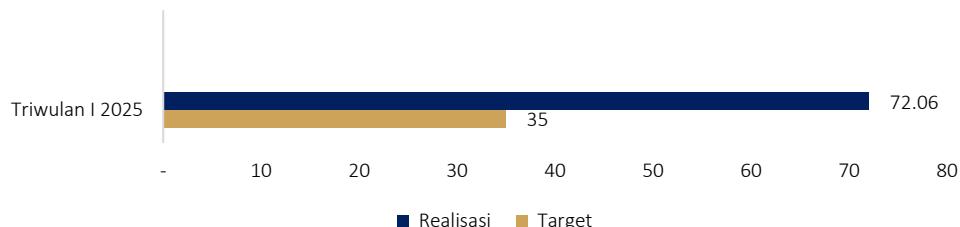
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB.

Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Triwulan I tahun 2025 sebesar 72,06% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 35% maka capaian kinerja mencapai 37,06%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar II. 9 Realisasi IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - PP 80 Tahun 2012 tentang Penindakan Lalu Lintas;
 - Surat Keputusan DJPD Nomor 736 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - Surat Keputusan DJPD Nomor 5370 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

• Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebesar 35% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

- Faktor Keberhasilan
 - SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
 - Sarana dan prasarana yang memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkualitas.
- Faktor Kegagalan
 - SOP tidak terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
 - Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berintegritas dan berkualitas.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK\ 3.2 &= \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\% \\ &= \frac{6.859}{9.519} \times 100\% = 72.06\% \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{(35\% - (72.06\% - 35\%))}{35\%} \times 100\% = 37,06\% \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Triwulan I Tahun 2025 melekat pada anggaran operasional UPPKB yang memiliki target keuangan Triwulan I senilai Rp. 871.644.500,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2025 Rp. 619.134.602,- atau mencapai 17,76%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan kendaraan angkutan barang terkait kriteria pelanggaran kendaraan angkutan barang berupa pelanggaran *Over Dimension Over Loading*.

2. Memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi kembali pelanggaran yang sama;
3. Melaksanakan pengawasan dan penindakan di UPPKB terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran.

II.2.3.3. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

Terkait Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan mengacu pada kegiatan Pekan Keselamatan Jalan yang dilaksanakan di Provinsi Riau Tahun 2025.

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD.

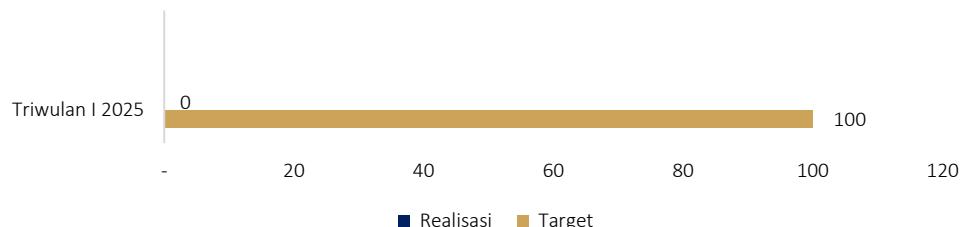
Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Cara Menghitung :

IKK 3.5 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pada PNKJ

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 0 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 200 maka capaian kinerja mencapai 0%. Hal ini karena memang waktu pelaksanaannya belum pada periode Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.



Gambar II. 10 Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - Draft Renstra Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 – 2029.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebesar 200 Orang yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;
 - Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
 - Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- Faktor Kegagalan
 - Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
 - Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
 - Kurangnya SDM.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK\ 3.5 &= \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pada PNK} \\ &= 0\ \text{Orang} \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{100} \times 100\% = 0 \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Triwulan I Tahun 2025 yang memiliki target keuangan Triwulan I senilai Rp. 0,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menjangkau ke elemen masyarakat yang lebih tepat sasaran,
2. Menginisiasikan kegiatan yang menarik minat generasi millennial untuk tertarik dan peduli terhadap keselamatan bertransportasi,
3. Melaksanakan sosialisasi dengan banyak cara baik via online maupun via offline.

II.2.3.4. IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4405/AJ.502/DRJD/2020.

Capaian kinerja persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah maupun swasta dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah dan jumlah UPUBKB milik swasta. Untuk menghitung indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 4.6 = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi}}{\text{Jumlah Pemda}} \times 100\%$$

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E). Standarisasi pengujian kendaraan dalam hal ini sebagai pemenuhan standar

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kab. Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB sebagai bermotor adalah aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Ruang Lingkup Unit Pelaksana Uji Berkala (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kab/Kota diwilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau yang terdiri 12 (dua belas) Kab/Kota di wilayah Provinsi Riau dengan penetapan standarisasi berupa Akreditasi UPUBKB sebanyak 10 (sepuluh) Kab/Kota dan 7 (tujuh) Kab/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan penetapan standarisasi berupa Akreditasi UPUBKB sebanyak 3 (tiga) Kab/Kota.

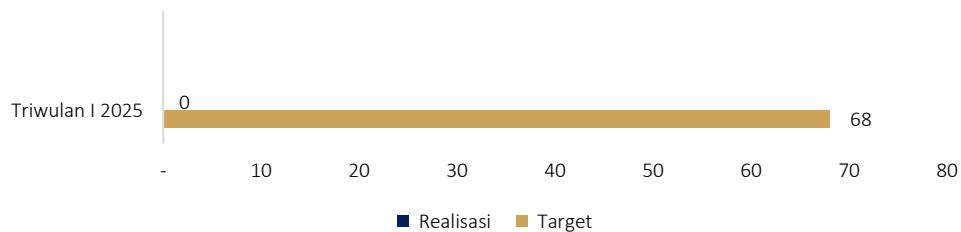
Tabel II.9 Data UPUBKB Dinas Perhubungan di Provinsi Riau dalam pemenuhan Standarisasi berupa Akreditasi UPUBKB

NO	KAB/KOTA	KETERANGAN	MASA BERLAKU AKREDITASI
PROVINSI RIAU			
1.	Kota Pekanbaru	TERAKREDITASI B	16 JUNI 2027
2.	Kota Dumai	TERAKREDITASI C	10 JUNI 2026
3.	Kab. Pelalawan	TERAKREDITASI B *Belum mengajukan permohonan akreditasi	25 SEPTEMBER 2020
4.	Kab. Bengkalis	TERAKREDITASI B *Telah dilaksanakan inventarisasi persiapan akreditasi melalui pelaksanaan pra akreditasi pada tanggal 29 Desember 2021	2 JULI 2021
5.	Kab. Kampar	TERAKREDITASI B *Telah dilaksanakan inventarisasi persiapan akreditasi melalui pelaksanaan pra akreditasi pada tanggal 29 Juni 2024	8 MEI 2024
6.	Kab. Indragiri Hulu	TERAKREDITASI B *Telah dilaksanakan pelaksanaan akreditasi oleh Ditjen Hubdat dan BPTD Wil. IV Prov Riau-Kepri pada tanggal 10-12 Agustus 2024. Selanjutnya menunggu hasil dan sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubdat	29 JANUARI 2024

NO	KAB/KOTA	KETERANGAN	MASA BERLAKU AKREDITASI
7.	Kab. Rokan Hulu	TERAKREDITASI B	4 OKTOBER 2025
8.	Kab. Rokan Hilir	TERAKREDITASI B	20 JULI 2027
9.	Kab. Kuantan Singingi	TERAKREDITASI B *Telah dilaksanakan pelaksanaan akreditasi oleh Ditjen Hubdat dan BPTD Wil. IV Prov Riau-Kepri pada tanggal 10-12 Agustus 2024. Selanjutnya menunggu hasil dan sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubdat	5 JULI 2021
10.	Kab. Siak	TERAKREDITASI C	11 JULI 2026
11.	Kab. Indragiri Hilir	TIDAK MELAKSANAKAN PENGUJIAN	
12.	Kab. Kepulauan Meranti	TIDAK MELAKSANAKAN PENGUJIAN	

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Triwulan I tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 68% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.



Gambar II. 11 Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 - Perdirjen Nomor KP.4405/AJ.502/DRJD/2020

- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Persentase Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebesar 68% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

- Faktor Keberhasilan

- Tersedianya fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pengujian;
- Terpenuhinya SDM yang memahami tentang pengujian;
- Kesesuaian dan Keakuratan alat pengujian.

- Faktor Kegagalan

- Tidak tersedianya fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pengujian;
- Tidak Terpenuhinya SDM yang memahami tentang pengujian;
- Kesesuaian dan Keakuratan alat pengujian.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$IKK 7a = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (Prov. Riau + Prov. Kepri + Kota + Kab) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0\%}{68\%} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Triwulan I Tahun 2025 yang memiliki target keuangan Triwulan I senilai Rp. 103.100.000,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu

1. Peningkatan klasifikasi Akreditasi UPUBKB melalui Rencana Aksi dan Komitmen Pemerintah Daerah melalui Bupati/Walikota berupa kesanggupan untuk melengkapi kekurangan dengan jangka waktu tertentu dalam terpenuhinya peningkatan klasifikasi Akreditasi UPUBKB yang sudah diperoleh berupa Rencana Aksi dan Komitmen dalam ketersediaan penganggaran serta selanjutnya penerapan pembayaran pelayanan Non Tunai (*Cashlees*) dalam peningkatan klasifikasi Akreditasi berdasarkan ketentuan peraturan yang ditetapkan.
2. Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor *drive throu* serta *booking online*. Diharapkan dengan terlaksananya pencapaian dimasa yang akan datang akan meningkatkan pelayanan serta efisien waktu dalam pelaksanaan pelayanan. Dengan adanya sistem *booking online* maka pemilik kendaraan dapat mendaftarkan kendaraannya jauh hari sebelum waktu batas habis masa pengujian dan tidak perlu datang ke pengujian kendaraan bermotor untuk menunggu antrian dan dapat langsung datang ke pengujian kendaraan bermotor saat tanggal booking sudah dipilih.
3. Untuk pengujian kendaraan bermotor *drive throu* tentunya akan mempermudah pengemudi/pemilik kendaraan dalam melaksanakan proses pengujian kendaraan bermotor tanpa perlu turun dari kendaraan. Pengemudi/pemilik kendaraan dapat melaksanakan proses pengujian kendaraan bermotor dengan tetap didalam kendaraan.

II.2.3.5. IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

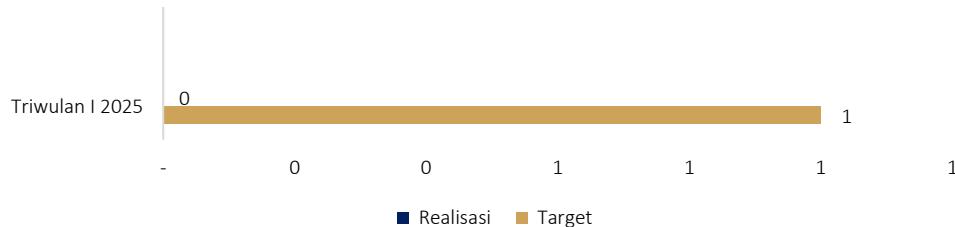
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Triwulan I tahun 2025 sebesar 0 lokasi jika dibandingkan dengan target Triwulan I PK 2025 sebesar 1 lokasi maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Grafik Capaian IKK Jumlah

Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Triwulan I tahun 2025.



Gambar II. 12 Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Alur Pelayaran SDP

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - PM 52 Tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau;
 - Peraturan Menteri (PM) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan;
 - PM 27 Tahun 2016 tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan;
 - PM 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket;
 - PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan; dan
 - PM 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebesar 1 yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Sesuainya Spesifikasi Teknis terhadap Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP yang akan dipasang di Daerah Aliran Sungai;
 - Sesuainya titik lokasi pada pemasangan Fasilitas Keselamatan Pelayaran SDP yang akan dipasang di Daerah Aliran Sungai;
 - Berfungsinya Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP kepada masyarakat sehingga dapat membantu proses pelayaran di Alur Pelayaran di Sungai.
- Faktor Kegagalan
 - Tidak sesuainya Spesifikasi Teknis terhadap Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP yang akan dipasang di Daerah Aliran Sungai;
 - Tidak sesuainya titik lokasi pada pemasangan Fasilitas Keselamatan Pelayaran SDP yang akan dipasang di Daerah Aliran Sungai;

- Tidak berfungsinya Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP kepada masyarakat sehingga dapat membantu proses pelayaran di Alur Pelayaran di Sungai.
- Perhitungan Realisasi Kinerja
Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK 7b &= \text{Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun 2025} \\ &= 0 \end{aligned}$$

- Perhitungan Capaian Kinerja
Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{1} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Triwulan I Tahun 2025 yang memiliki target keuangan Triwulan I senilai Rp. 250.000.000,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Menjalin hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder terkait demi kelengkapan data dukung usulan kegiatan;
2. Mengevaluasi seluruh mitra penyedia/vendor eksternal demi kelancaran kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas laporan dan sistem kerja yang telah berjalan pada periode sebelumnya.

II.2.4. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, mengacu pada kegiatan tupoksi perhubungan darat yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau menggunakan 1 (satu) IKK, yaitu:

IKK 5.1 : Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.10 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					18,33%
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	16,5	18,33%

II.2.4.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2024 dihitung berdasarkan beberapa aspek. Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan; dan
- d) Aspek Hukum dan Kerjasama.

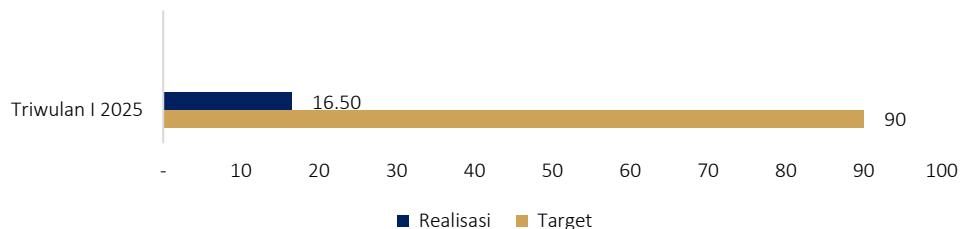
Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan I tahun 2025 sebesar 16,50 jika dibandingkan dengan target Triwulan I PK 2025 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 18,33%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Grafik Realisasi IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan I tahun 2025.



Gambar II. 13 Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - Permen PANRB No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Sarana & Prasarana Kantor;
 - Rencana Startegi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020 - 2024;
 - PM Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PM 03 2014 Pedoman Susun RKA Kemenhub.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebesar 90 yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2020-2025. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.
- Faktor Keberhasilan
 - Melaksanakan pendataan kebutuhan internal dengan rasional dan tepat sasaran;
 - Mempersiapkan dokumen data dukung secara lengkap dan sesuai dengan regulasi;
 - Meningkatkan kuantitas sarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan beserta kualitas SDM petugas.
- Faktor Kegagalan
 - Tidak Melaksanakan pendataan kebutuhan internal dengan rasional dan tepat sasaran;
 - Tidak mempersiapkan dokumen data dukung secara lengkap dan sesuai dengan regulasi;
 - Tidak Meningkatkan kuantitas sarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan beserta kualitas SDM petugas.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.11 Perhitungan IKK Tingkat Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	15	5
1	<i>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</i>		20
	<i>a Rencana Strategis (Renstra)</i>		3
	<i>b Rencana Kerja Tahunan (RKT)</i>		2
	<i>c Perjanjian Kinerja (PK)</i>		2
	<i>d Rencana Aksi (Renaksi)</i>		2
	<i>e Input Aplikasi e-Performance</i>		1
	<i>f Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III</i>		2
	<i>g Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</i>		3
2	<i>Pengisian Input E-planning</i>		
	<i>a Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan</i>		2
	<i>b Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif</i>		1
	<i>c Input Aplikasi e-Planning Pagu Anggaran</i>		1
	<i>d Input Aplikasi e-Planning Pagu Alokasi Anggaran</i>		1
B	Indeks Profesionalisme ASN	25	5.0
1	<i>Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)</i>		5
2	<i>Kompetensi</i>		7
3	<i>Kinerja</i>		7
4	<i>Disiplin</i>		1
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25	3.25
1	<i>Daya Serap Anggaran Satuan Kerja</i>		5
2	<i>Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)</i>		2
3	<i>Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)</i>		6
D	Tingkat Pengelolaan Hukum dan Humas	25	3.25
1	<i>Penyusunan NSPK</i>		3
2	<i>Pengelolaan Informasi Publik</i>		4
3	<i>Penyusunan Perjanjian dan Kerjasama</i>		4
4	<i>Pelaksanaan Advokasi Hukum</i>		2
TOTAL			16.50

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{16,50}{90} \times 100\% = 18,33\%$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan I Tahun 2025 yang memiliki target keuangan Triwulan I senilai Rp. 1.018.085.000,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2025 Rp. 96.087.419,- atau mencapai 2,36%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merencanakan dengan sebaik-baiknya serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran, baik Dinas Perhubungan di daerah wilayah kerja dan juga dengan Kementerian Perhubungan Pusat;
2. Meningkatkan kualitas pegawai dengan diklat maupun bimtek, kedisiplinan sehingga meningkat pula kinerja instansi BPTD;
3. Mengelola keuangan dengan penyerapan yang tepat sasaran dan mencapai target serap seoptimal mungkin, meningkatkan jumlah BMN yang ber-status PSP;
4. Melakukan birokrasi yang transparan dan bekerja sama dengan baik terhadap seluruh stakeholder.

II.2.5. SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Perkantoran Perhubungan Darat, mengacu pada kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau menggunakan 1 (satu) IKK, yaitu:

IKK 6.1 : Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II.12 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel				74,75%	
IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	74,75	74,75%

II.2.5.1. IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

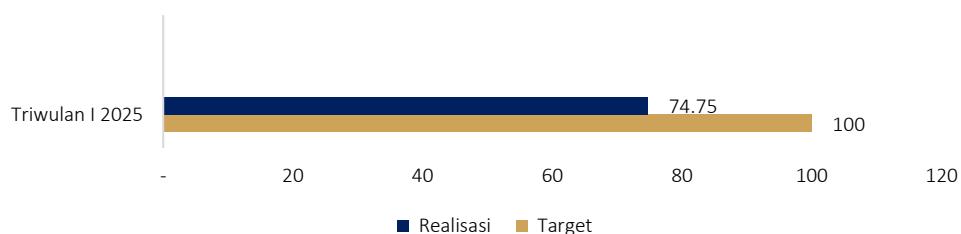
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

Capaian kinerja kualitas penyelenggaraan perkantoran Ditjen perhubungan Darat darat tahun 2025 dihitung berdasarkan lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja). Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan I tahun 2025 sebesar 74,75 lokasi jika dibandingkan dengan target Triwulan I PK 2025 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 74,75%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Grafik Capaian IKK tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan I tahun 2025.



Gambar II. 14 Realisasi IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum
 - Permen PANRB No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Sarana & Prasarana Kantor;
 - Rencana Startegi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun 2020 - 2024;
 - PM Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PM 03 2014 Pedoman Susun RKA Kemenhub.
- Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025

Adapun target IKK tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau 2025-2029 dengan target sebesar 100 yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

- Faktor Keberhasilan
 - Melaksanakan pendataan kebutuhan internal dengan rasional dan tepat sasaran;
 - Mempersiapkan dokumen data dukung secara lengkap dan sesuai dengan regulasi;
 - Meningkatkan kuantitas sarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan beserta kualitas SDM petugas.
- Faktor Kegagalan
 - Tidak Melaksanakan pendataan kebutuhan internal dengan rasional dan tepat sasaran;
 - Tidak mempersiapkan dokumen data dukung secara lengkap dan sesuai dengan regulasi;
 - Tidak Meningkatkan kuantitas sarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan beserta kualitas SDM petugas.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Perhitungan dilakukan dengan bobot sebagai berikut:

- Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV (25%);
- Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
- Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

Tabel II.13 Perhitungan IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	2.5
	1	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III		5
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV		5
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	8.75
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	63.5
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)		95
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)		15
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)		17
TOTAL				74.75

- Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{74,75}{100} \times 100\% = \mathbf{74,75\%}\end{aligned}$$

- Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan I Tahun 2025 yang memiliki target keuangan Triwulan I senilai Rp. 7.229.946.500,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2025 Rp. 6.847.868.928,- atau mencapai 23,68%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menginventarisir kebutuhan-kebutuhan pada aspek layanan perkantoran;
2. Membuat perencanaan terkait kebutuhan-kebutuhan dan menuangkannya pada Rencana Kerja Anggaran-Layanan Perkantoran;
3. Merealisasikan rencana tersebut dengan efektif dan efisien.

II.3. Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

II.3.1.1. Pagu Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp. 130.466.736.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

a.1. Rincian Per Sumber Dana Triwulan I Tahun 2025

RM	Rp 104,885,317,000	80.39%
PNBP	Rp 25,581,419,000	19.61%
Total	Rp 130,466,736,000	100%

a.2. Rincian Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp 19,853,910,000	15.22%
Belanja Barang	Rp 56,023,104,000	42.94%
Belanja Modal	Rp 54,589,722,000	41.84%
Total	Rp 130,466,736,000	100%

II.3.1.2. Realokasi Anggaran Tahun 2025

Pada periode Triwulan I tahun 2025 ini BPTD Kelas II Riau tidak ada melaksanakan perubahan / revisi / realokasi anggaran.

II.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2025

Berikut merupakan data pagu dan realisasi dari tahun 2017 hingga 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.14 Perbandingan Pagu & Realisasi

NO	TAHUN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	
		RP.	RP.	RP.	%
1	2017	746.173.000	746.173.000	735.012.888	98,50%
2	2018	154.886.371.000	155.881.123.000	149.097.305.920	95,65%
3	2019	101.436.870.000	92.185.911.000	87.366.439.252	94,77%
4	2020	105.765.540.000	114.521.748.000	113.299.373.799	98,93%
5	2021	226.695.617.000	154.373.472.000	153.524.008.177	99,45%
6	2022	145.564.552.000	146.752.998.000	146.660.930.163	99,94%
7	2023	217.438.999.000	199.220.705.000	200.026.849.087	99,81%
8	2024	167.004.214.000	175.590.910.000	163.496.712.355	93,11%
9.	2025 (Triwulan 1)	130.466.736.000	130.466.736.000	10.160.383.349	7,79%

II.3.2. Realisasi Anggaran TA. 2025

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan I tahun 2025 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 10.160.383.349,- atau mencapai 7,79% dari total pagu sebesar Rp. 130.466.736.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

II.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Triwulan I TA. 2025

Tabel II.15 Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Pada Periode Triwulan I TA. 2025

KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	TRIWULAN I	
			REALISASI	%
403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV	130,466,736,000	10,160,383,349	7.79%
02203GA	Program Infrastruktur Konektivitas	81,693,040,000	4,325,623,856	5.29%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	32,411,878,000	507,673,958	1.57%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	22,153,789,000	2,781,707,029	12.56%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	22,551,010,000	608,491,499	2.70%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4,576,363,000	427,751,370	9.35%
02203WA	Program Dukungan Manajemen	48,773,696,000	5,834,759,493	11.96%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	28,919,786,000	1,697,786,942	5.87%
4671	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	19,853,910,000	4,136,972,551	20.84%

II.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I TA. 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
			Rp.	%
1	Belanja Pegawai	19,853,910,000	4,136,972,551	20.84%
2	Belanja Barang	56,023,104,000	5,873,410,798	10.48%
3	Belanja Modal	54,589,722,000	150,000,000	0.27%
TOTAL		130,466,736,000	10,160,383,349	7.79%

II.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Triwulan I TA. 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
			Rp.	%
1	Rupiah Murni	104,885,317,000	10,160,383,349	9.69%
2	PNBP	25,581,419,000	0	0.00%
TOTAL		130,466,736,000	10,160,383,349	7.79%

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II.3.3.1. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan Sasaran Kegiatan per-Triwulan I Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.16 Efisiensi Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	Triwulan I		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan I)
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	42.70%	17.27%	25.43%
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	76.70%	35.06%	41.64%
3	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	7.41%	3.55%	3.86%
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	18.33%	2.36%	15.97%
5	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	74.75%	23.68%	51.07%
Rata-Rata		43.98%	16.38%	27.60%

II.3.3.2. Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang masih dalam penyesuaian dan berpaku pada arahan pimpinan pusat dan Kementerian keuangan tentunya;
2. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat bahkan level perubahan dalam ruang lingkup banyak matra yang beberapa saling berdampak terhadap administrasi dan wewenang menyebabkan perubahan dan pergantian beberapa pejabat internal BPTD sehingga proses pelaksanakan kegiatan mengalami penyesuaian dokumen yang cukup menyita waktu;
3. Proses revisi DIPA merupakan salah satu hambatan dalam penyerapan dana APBN karena lamanya waktu dalam melakukan revisi DIPA.

Contents

Bab II Capaian Kinerja Triwulanan	2
A. Tahapan Pengukuran Kinerja.....	2
1. Pengukuran Capaian Kinerja	3
B. Capaian Kinerja Organisasi	Error! Bookmark not defined.
1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	Error!
Bookmark not defined.	
2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Error!
Bookmark not defined.	
3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Error!
Bookmark not defined.	
4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	Error!
Bookmark not defined.	
5. Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	Error!
Bookmark not defined.	
C. Realisasi Anggaran	Error! Bookmark not defined. 2
1. Alokasi Anggaran Tahun 2021	Error! Bookmark not defined. 2
2. Refocussing Anggaran Tahun 2021.....	Error! Bookmark not defined. 3
3. Realisasi Anggaran.....	Error! Bookmark not defined. 4



BAB III

PENUTUP

Bab III

Penutup

III. Penutup

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat serta Pengelolahan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

III.1. Ringkasan Capaian

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 ini terdapat 14 (Empat Belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau triwulan I tahun 2025. Terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($\text{IKK} \geq 100\%$) dan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq \text{IKP} < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan terealisasi sebesar 10% (target 100%) tercapai 10%;
 - b. Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi terealisasi sebesar 3 (target 3) tercapai 100%;
 - c. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terealisasi sebesar 50% (target 100%) tercapai 50%;
 - d. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 4 (target 37) tercapai 10,81%;
 - e. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A terealisasi sebesar 62,6% (target 100%) tercapai 62,6%;
 - f. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A terealisasi sebesar 50% (target 50%) tercapai 100%;
 - g. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 62,5% (target 100%) tercapai 62,5%;
 - h. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 99% (target 90%) tercapai 110,89%;
 - i. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 72,06% (target 35%) tercapai 37,06%;
 - j. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0 Orang (target 200 Orang) tercapai 0%;
 - k. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 0% (target 68%) tercapai 0%;
 - l. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terealisasi sebesar 0 (target 1) tercapai 0%;
 - m. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi senilai 81 (target 90) tercapai 16,5%;
 - n. Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 74,75 (target 100) tercapai 74,75%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau akan meningkatkan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau; Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*,

Melaksanakan evaluasi berkala dan substansial dalam merencanakan, mempersiapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau.

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	10	10%	BELUM TERCAPAI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kerapihan administrasi pelaporan 2. Melaksanakan Monitoring pelaksanaan keperintisan angkutan 3. Mengadakan rapat evaluasi terhadap vendor selama berjalan kontrak Triwulan I 4. Menjalin komunikasi baik terhadap Vendor agar memudahkan pemecahan masalah selama pelaksanaan 	Seksi Sarana & Angkutan Jalan, SDP
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	3	3	3	100%	TERCAPAI	Melakukan evaluasi kebutuhan prasarana guna menunjang kegiatan operasional di terminal	Seksi Prasarana Jalan, SDP
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	50	100%	TERCAPAI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Monitoring pelaksanaan keperintisan Penyeberangan 2. Mengadakan rapat evaluasi terhadap vendor selama berjalan kontrak Triwulan II 3. Menjalin komunikasi baik terhadap Vendor agar memudahkan pemecahan masalah selama pelaksanaan 	Seksi Sarana & Angkutan Jalan, SDP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT		PENANGGUNG JAWAB
	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	37	37	4	100%	TERCAPAI	Monitoring dan evaluasi fasilitas Terminal Penumpang		Seksi Prasarana Jalan, SDP
2		IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	100	100	62.6	62.6%	BELUM TERCAPAI	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk terus mengupdate data SPM terminal		Seksi Prasarana Jalan, SDP
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	50	50	50	100%	TERCAPAI	Perlu dilakukan peningkatan prasarana pendukung SMART terminal seperti CCTV yang digunakan untuk pengawasan dan keamanan di Terminal		Seksi Prasarana Jalan, SDP
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	62.5	62.5%	BELUM TERCAPAI	Monitoring dan evaluasi fasilitas Pelabuhan SDP		Seksi Prasarana Jalan, SDP
3	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	90	0	0%	TERCAPAI	Masih menunggu arahan pusat dikarenakan adanya Instruksi Presiden terkait Efisiensi Anggaran		Seksi Lalu Lintas Jalan, SDP & Pengawasan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35	35	72.06%	37.06%	BELUM TERCAPAI	Upaya yang dilakukan saat ini dengan terus melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap UPPKB Di BPTD Kelas II riau untuk lebih ketat dalam menindak pelanggar muatan barang sehingga bisa mendapatkan efek jera	Seksi Prasarana Jalan, SDP
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200	200	0	0%	BELUM TERCAPAI	Kegiatan akan diselenggarakan pada bulan Agustus	Seksi Sarana & Angkutan Jalan, SDP
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	68	68	0	0%	TERCAPAI	Masih menunggu arahan pusat dikarenakan adanya Intruksi Presiden terkait Efisiensi Anggaran	Seksi Sarana & Angkutan Jalan, SDP
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Masih menunggu arahan pusat dikarenakan adanya Intruksi Presiden terkait Efisiensi Anggaran	Seksi Lalu Lintas Jalan, SDP & Pengawasan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	16.5	16.5%	BELUM TERCAPAI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dengan sebaik-baiknya serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran, baik Dinas Perhubungan di daerah wilayah kerja dan juga dengan Kementerian Perhubungan Pusat; 2. Meningkatkan kualitas pegawai dengan diklat maupun bimtek, kedisiplinan sehingga meningkat pula kinerja instansi BPTD; 3. Mengelola keuangan dengan penyerapan yang tepat sasaran dan mencapai target serap seoptimal mungkin, meningkatkan jumlah BMN yang ber-status PSP; 4. Melakukan birokrasi yang transparan dan bekerja sama dengan baik terhadap seluruh stakeholder. 	Sub Bagian Tata Usaha
5	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1 Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	74.75	74.75%	BELUM TERCAPAI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisir kebutuhan-kebutuhan pada aspek layanan perkantoran; 2. Membuat perencanaan terkait kebutuhan-kebutuhan dan menuangkannya pada Rencana Kerja Anggaran-Layanan Perkantoran; 3. Merealisasikan rencana tersebut dengan efektif dan efisien. 	Sub Bagian Tata Usaha